HARIAN
GORONTALO POST
Pertama dan Terbesar di Gorontalo
www.gorontalopost.id

Terverifikasi Faktual
Dewan Pers
No: 169/DP-Terverifikasi/K/IV/2018

TERBIT SENIN- JUMAT | 12 HALAMAN | JUMAT, 6 NOVEMBER | TAHUN 2026 | Rp. 10.000,-

https://digital.gorontalopost.id
https://gorontalopost.id

TRIWULAN III
Ekonomi Gorontalo Melambat

GORONTALO - Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada triwulan III tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,63 persen secara year-on-year (yoy) dan secara kuartal pertumbuhan tumbuh sekitar 2,01 persen (q-to-q).

Terlihat capaian ini lebih rendah dibanding triwulan II 2026, dimana pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh sebesar 6,20 persen dan menempatkan Gorontalo sebagai Provinsi yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sulawesi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada triwulan III memang mengalami perlambatan karena disebabkan oleh beberapa faktor sehingga tumbuh hanya diangka 5,63 persen. Namun secara kumulatif (c-to-c) ekonomi Gorontalo di triwulan III 2026 mencapai 6,49 persen.

Bersambung ke **Hal.2**

DISWAY

Oleh: Dahlan Iskan



Penyadapan Beneficial

DALAM kasus penyadapan nan viral dua hari terakhir ini, pertanyaan wartawan yang kelihatannya lugu tapi justru terasa lucu adalah: apakah wapres Gibran termasuk yang disadap?

Mungkin, si wartawan, yang begitu lugunya, tidak pernah mengenal teori konspirasi: bahwa menurut teori itu penyadapan dilakukan untuk mengintai lawan-lawan politik keluarga Solo –termasuk Mas Gibran di dalamnya.

Pertanyaan itu memang diajukan ke Menko Hukum HAM Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelum daftar siapa saja yang disadap beredar di medsos. Jadi pertanyaan itu benar-benar lugu tapi lucu. Prof Yusril sampai tertawa agak lama sebelum bisa menjawab, ''saya tidak tahu''.

Bersambung ke **Hal.2**



(FOTO: ISTIMEWA)
Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah aslinya dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim).

ROY SURYO MALAH NGAKAK

JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan fitnah dan pencerman nama baik Roy Suryo tertawa saat Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah aslinya dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim).

Tak hanya itu, mantan Menpora ini juga sempat meminta majelis hakim mengusir pengunjung sidang. Momen itu terlihat saat Jokowi memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam persidangan pada Kamis (5/11).

Bersambung ke **Hal.2**

LAGI, SATU JENDERAL JADI TERSANGKA

Irjen Slamet Pegang Kendali Penyadapan Presiden

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan mantan Kabag Monitoring Bareskrim Inspektur Jenderal (Irjen) Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo beserta tokoh lainnya.



Irjen Slamet Uliandi

Penetapan status tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, setelah penyidik menyimpulkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan hasil gelar perkara.

Bersambung ke **Hal.2**

RUU PERAMPASAN ASET
Pertegas Hukuman Mati Koruptor

JAKARTA -GP- Salah satu pokok aturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset akan mempertegas hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. "Nanti akan menegaskan bahwa memang terhadap tindak pidana korupsi dengan kondisi tertentu, memang dikenakan hukuman mati," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Kamis (5/11).

Dia mengatakan hukuman mati yang ditegaskan itu berdasarkan undang-undang lain yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Habiburokhman, hukuman mati saat ini masih berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah berlaku mulai 2026.

Bersambung ke **Hal.2**

WAGUB IDAH SYAHIDAH RH APRESIASI HADIRNYA LAYANAN SAMSAT DI PASAR MURAH
Kini Layanan Samsat Lebih Dekat dengan Masyarakat



(FOTO: NOVA/ DISKOMINFO)
WAKIL Gubernur Gorontalo Idah Syahidah RH didampingi Kepala Dinas Kumperindag Faisal Lamaraka bersama masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor pada mobil Samsat di lokasi Pasar Murah Desa Bakti, Kamis (5/11).

WAKIL Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mengapresiasi masyarakat yang memanfaatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui mobil Samsat yang dihadirkan dalam pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Kamis (5/11/2026).

PASAR murah yang dibuka langsung oleh Gubernu Gusnar Ismail tersebut menyediakan sebanyak 1.500 kupon untuk masyarakat se-Kecamatan Pulubala. Kegiatan ini tidak hanya memberikan akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang memudahkan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Idah turut melayani secara langsung masyarakat yang datang untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Ia juga menyerahkan kupon pasar murah kepada salah seorang warga yang telah menyelesaikan pembayaran pajak, sehingga dapat langsung berbelanja tanpa harus mengikuti antrean pembeli lainnya.

Idah menjelaskan, layanan Samsat merupakan fasilitas yang rutin dihadirkan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam setiap pelaksanaan pasar murah. Langkah ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

Bersambung ke **Hal.2**

Lagi, Satu Jenderal jadi Tersangka

dari halaman 1

Hermanto menjelaskan, dalam penyidikan terungkap bahwa tersangka SU bertindak sebagai dewan pembina MC Bareskrim Polri, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kabag Monitoring Bareskrim periode 2010 hingga 2019. Hingga saat ini, total tersangka dalam perkara penyadapan tanpa prosedur resmi ini berjumlah empat orang polisi berpangkat jenderal. Sebelumnya, tiga jenderal yang lebih dulu ditetapkan tersangka dan ditahan, yakni eks Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri membeberkan peran krusial Irjen Slamet Uliandi (SU) dalam kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo. Berdasarkan hasil gelar perkara, tersangka Slamet Uliandi diketahui memegang kendali atas izin operasional sistem penyadapan serta memberikan lampu hijau untuk menghapus sejumlah berkas digital penting.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto menuturkan, Slamet Uliandi memiliki rekam jejak sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Ia juga pernah mengemban jabatan sebagai Kabagmon atau Kabagmonitoring Bareskrim pada rentang waktu 2010 hingga 2019.

Penyidik menemukan bahwa setiap kali tersangka lain, seperti Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS) dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), hendak melaksanakan proses provisioning atau penyadapan, mereka wajib mengantongi izin dari SU.

"Tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari saudara SU," katanya. Keterlibatan Slamet Uliandi semakin menguat tatkala memasuki awal Oktober 2026. Tersangka AS tercatat meminta izin kepada Slamet Uliandi untuk melakukan pembersihan atau penghapusan terhadap hasil rekaman penyadapan yang telah dilakukannya.

Menanggapi permintaan tersebut, Slamet Uliandi langsung memberikan persetujuan atau ACC untuk mengeksekusi penghapusan file hasil sadapan tersebut. Langkah ini menjadi salah satu fokus utama penyidik dalam mengusut tuntas upaya penghilangan jejak digital dalam perkara ini.

"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," terangnya.

Sementara itu, tersangka Slamet Uliandi belum dapat ditahan karena kondisi kesehatannya yang sedang dalam pemulihan pasca stroke. Dari segi penanganan perkara, penyidik telah memeriksa 13 orang saksi serta meminta keterangan dari 5 orang ahli, yang terdiri atas 3 ahli ITE dan 2 ahli pidana. Akibat perbuatannya, Slamet Uliandi dijerat dengan pasal berlapis. Yakni, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) tentang akses ilegal dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Serta, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE terkait penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun penjara, juncto Pasal 20 huruf C KUHP. **(jp)**

Pertegas Hukuman Mati Koruptor

dari halaman 1

"Saat ini masih berlaku di Indonesia. Jangan dianggap hukuman mati tidak ada," katanya. Selain itu, Habiburokhman memastikan RUU itu akan mengatur juga pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, agar tidak dijadikan senjata politik atau sarana untuk memeras oleh aparat penegak hukum.

Dalam penyusunannya, Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR RI telah menghimpun seluruh masukan terhadap desain dan substansi dari Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.

"Pada intinya, seluruh masyarakat menginginkan sebuah pengaturan yang efektif, proporsional, adil, dan sesuai dengan asas prosedural dan legalitas," katanya. Adapun Komisi III DPR RI telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset dari pemerintah dan panitia kerja (Panja) belakangan sudah mulai intens membahas isi dari RUU itu. **(antara)**

Ekonomi Gorontalo Melambat

dari halaman 1

"Secara kumulatif dari triwulan 1 hingga triwulan III atau total tahun 2026 perekonomian Gorontalo tumbuh mencapai 6,49 persen. Memang melambat dibanding Triwulan II 2026," ungkap Agus Sudibyo dalam rilis berita resmi statistik, Kamis, (5/11).

Dampak kemarau yang panjang menjadi momok bagi pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengakibatkan tertundanya masa tanam. Terlihat, tiga sektor unggulan tersebut hanya memberi kontribusi tipis diangka 1,60 persen. Dari sisi Produk Domestik Bruto (PDRB), Agus Sudibyo memaparkan, di triwulan III PDRB Provinsi Gorontalo Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berada diangka Rp 9,3 Triliun atau meningkat dibandingkan triwulan III tahun 2025 sebesar Rp 8,8 Triliun. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo dengan laju 5,63 persen secara tahunan (yoy) tersebut memberi kontribusi PDRB perekonomian Pulau Sulawesi dengan nilai sebesar 3,35 persen. "Provinsi Gorontalo masih menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi ke empat tertinggi diwilayah Sulawesi," tukasnya

Secara garis besar, Sulawesi tengah masih menjadi Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sulawesi pada triwulan III 2026 dengan laju pertumbuhan mencapai 5,96 persen. Posisi kedua Provinsi Sulawesi tenggara 5,79 persen, Sulawesi selatan di posisi ketiga dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,75 persen. Sementara itu, provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi dibawah Provinsi Gorontalo masing-masing Sulawesi barat 5,31 persen dan Sulawesi utara 4,85 persen.

Kategori distribusi dan pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran masih dikendalikan oleh konsumsi rumahtangga. Tercacat, konsumsi rumahtangga memberi andil lebih dari limapuluh persen bagi pertumbuhan ekonomi Gorontalo dengan distribusi mencapai 59,37 persen. Berikutnya adalah ekspor yang memberi kontribusi 37,51 persen. Selanjutnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 28,26 persen dan konsumsi pemerintah memberi andil sebesar 14,18 persen.

Sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo di triwulan ke III 2026 (yoy) berasal dari Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi terbesar mencapai 1,82 persen.

"Total dari angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,63 persen , 1,82 persen berasal dari kategori pertambangan dan penggalian," ujar Agus Sudibyo. Selain pertambangan dan penggalian, industri pengolahan juga memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,51 persen disusul Jasa konstruksi sebesar 0,71 persen. **(lyd)**

Penyadapan Beneficial

dari halaman 1

Saya mengikuti beberapa kanal TikTok live kemarin malam. Salah satunya yang dipandu Hasbi Center. Yang bergabung di live itu lebih 1.000 orang. Siapa pun boleh bicara. Salah satunya beridentitas kopral –pasti bukan nama sebenarnya. Pembahasan di situ sudah mengarah pasti: penyadapan itu didalangi Jokowi –mantan presiden Indonesia dua periode yang digantikan Prabowo Subianto.

Meski itu teori konspirasi tapi mewakili perasaan banyak orang –yang hanya di pikirannya menyebut nama Jokowi tapi di lisannya terkunci –karena takut kena pasal fitnah. Tidak mudah membuktikan itu. Mereka yang sekarang menjadi tersangka pasti mengunci mulut. Pergerakan intelijen seperti itu biasanya diikat dalam sumpah mati: tidak akan pernah buka mulut sampai pun disiksa atau diancam dibunuh.

Maka aneh ketika ada kabar bahwa salah satu jenderal polisi bintang tiga yang ditangkap itu kemudian mengaku: penyadapan atas perintah Listyo Sigit Prabowo –yang baru sebulan lalu melepaskan jabatan kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Dari pengakuan mantan ajudan Prabowo itulah Listyo, jenderal bintang empat yang masih aktif dan menjabat kepala staf kepresidenan, ditangkap. Mengapa si bintang tiga sampai mengaku adalah tanda tanya besar. Bisa jadi kepepet sehingga terpaksa mengaku –untuk kelak pengakuan itu dicabut. Bisa juga mengaku beneran. Tapi aneh juga mengapa mudah terpaksa mengaku. Padahal orang yang disebut memerintahkan adalah atasannya –setidaknya mantan atasannya. Yang begitu itu biasanya karena ''yang bersangkutan'' melihat ''kapal'' sudah tidak mungkin diselamatkan. Awalnya ybs mengira ''kapal'' itu kuat dan kokoh. Ia percaya tidak lama lagi ''kapal'' itu akan sampai pelabuhan kekuasaan. Maka kalau ''ybs'' bertahan ikut di dalam kapal akan ikut pula naik ke pelabuhan kekuasaan. Keyakinan mereka bahwa ''kapal'' itu kuat dan kokoh terlihat dari fakta di lapangan: popularitas Prabowo terus merosot. Pasti mudah dikalahkan. Persoalan-persoalan besar juga terus melanda negara –mulai bencana korupsi, bencana alam, bencana saham, sampai bencana nilai tukar rupiah. Yang paling parah adalah bencana asap.

Keyakinan bahwa ''kapal'' itu kokoh juga terlihat dari seringnya Presiden Prabowo memuji kehebatan Listyo Sigit sebagai kapolri. Apalagi kalau sudah menyangkut MBG: "Dapur milik Polrilah yang terbaik".

Presiden Prabowo tidak hanya memuji tapi terus mempertahankannya di jabatan itu sampai menjadi yang terlama dalam sejarah Indonesia. Maka ''awak kapal penyadapan'' itu melihat samudera yang dilayari adalah samudera yang tenang. Tidak akan ada gelombang. Kapal bisa terus melaju mengarah ke tujuan tanpa khawatir ada ikan hiu yang bisa menguncangnya. Padahal laut itu tidak pernah benar-benar tenang. Kegiatan penyadapan itu bukan tidak ada yang mengintai. Ada intelijen lain yang juga mencari apakah ada intelijen yang mengintelijeni intelijen. Tanda-tandanya kian nyata. Maka pengendusan kian mengarah ke titik-titik tertentu. Ketika tiba sampai pada kesimpulan bahwa kegiatan penyadapan itu mengarah ke keadaan membahayakan keputusan diambil tiba-tiba: Kapolri diganti! Sejak itu ''kapal'' mulai goyang. Seberapa kuat pun seseorang ia akan kehilangan gigi kalau jabatannya yang sangat berkuasa dipreteli. Kian hari mantan kapolri kian jauh dari kekuasannya. Kian hari pimpinan baru kian menguasai medan.

Polisi –apalagi tentara– menganut disiplin tegak lurus. Taat pada komandan. Bekas komandan bukanlah komandan. Saat itulah si kapten kapal mulai cari-cari sabuk pengaman: data hasil penyadapan harus dihapus atau dihancurkan. Mereka lupa bahwa penghancuran data itu bisa menjadi pasal lain yang lebih memberatkan mereka. Perintah penghancuran itu sendiri punya dampak sangat besar bagi mental internal awak kapal: ada apa? Mulai ketahuan? Kapten kapal tidak kuat lagi?

Dalam keadaan ''mental goyah'' seperti itu kehancuran mudah datang. Di antara awak pasti ada yang berpikir cari selamat. Bisa dengan cara mencebur ke laut. Bisa membawa lari sekoci. Atau bahkan justru memihak ''lawan''. Bisa juga karena intelijen yang melakukan kontra intelijen kian mudah masuk ke kapal: terbongkar. Dalam penegakan hukum yang menyasar perusahaan swasta kini sedang dikembangkan teori beneficial owner –untuk menjerat pemilik perusahaan yang bersembunyi di balik legalitas. Pemilik perusahaan tidak perlu menjadi komisaris atau direktur. Kalau ditemukan kejahatan di perusahaan, itu urusan direktur –seperti bunyi anggaran dasar perusahaan. Pemilik selamat. Padahal ada pemilik perusahaan yang tidak jadi komisaris atau pun direktur sebagai taktik semata. Dalam praktiknya keputusan penting tetap di tangannya. Maka kini dicari siapa beneficial owner –penerima manfaat sebenarnya perusahaan itu. Maka pemilik yang bersembunyi di balik legalitas anggaran dasar tidak bisa bersembunyi lagi.

Apakah dalam kasus penyadapan ini juga akan dipakai teori beneficial owner? Dalam istilah politik tidak dikenal beneficial owner. Yang dikenal adalah ''dalang'': siapa dalangnya? Maka beredarlah teori konspirasi menduga-duga siapa dalang di balik penyadapan itu. Bisa saja tidak ada dalang di balik layar penyadapan. Bisa saja semua itu inisiatif kapten kapal. Tidak ada perintah. Tidak bikin laporan. Beneficial owner hanya merasa pasti ada mantan anak buah yang mau melakukan apa pun demi dirinya.

Mungkin beneficial owner senyum-senyum dan tawa kecil saja. Ia tahu tidak boleh minta dilakukan penyadapan. Ia tidak boleh pernah menerima laporan hasil penyadapan. Urusan seperti itu terlalu tetek-bengek –yang bisa tidak dapat teteknya melainkan hanya dapat bengeknya. Maka bisa jadi kegiatan penyadapan itu sepenuhnya inisiatif kapten kapal. Atau inisiatif seluruh ABK. Mereka juga tidak merasa perlu melaporkan hasilnya ke siapa pun. Mereka cukup merasa ''si beliau'' senang dengan upaya yang mereka lakukan. Si beliau hanya tahu hasilnya tanpa peduli prosesnya.

Memang pertanyaan terpenting yang menggelitik adalah: untuk apa penyadapan itu dan untuk kepentingan siapa. Sebatas sebagai persiapan Pilpres 2029? Atau upaya menagih janji? Bahkan melakukan makar dalam waktu dekat dengan alasan yang dibuat mulia: ''menyelamatkan negara?''

Atau bukan demi ''beliau'' melainkan demi dirinya sendiri? Misalnya: agar bisa memegang rahasia tertinggi Presiden Prabowo. Atau rahasia tertinggi tokoh lain yang disadap. Sepenuhnya untuk menaikkan nilai tawar pribadi –saat itu atau setelah pensiun.

Tentu tidak mudah mengungkap semua itu mengingat tersangkanya adalah mantan kapolri, jenderal polisi berbintang empat. Inilah tersangka paling kakap dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Ketika Ferdy Sambo jadi tersangka hebohnya bukan main: jenderal bintang dua jadi tersangka. Ketika Febrie Adriansyah jadi tersangka juga heboh: jenderal berbintang tiga kejaksaan ditangkap.

Kini yang ditangkap jenderal polisi bintang empat. Penyadapan terjadi mungkin karena sudah dianggap biasa. Utamanya setelah kian banyak instansi yang boleh melakukan penyadapan. Dulu hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diizinkan melakukan penyadapan. rakyat bisa menerima. Saat itu kemarahan rakyat pada korupsi memang luar biasa. Membuktikan korupsi itu sulit. Maka bisa dimaklumi kalau KPK diizinkan menyadap telepon mereka yang dicurigai melakukan korupsi.

Tapi belakangan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga diizinkan menyadap. Demi memberantas narkoba. Lalu Polri. Juga kejaksaan. Kalau Badan Intelijen Negara tidak ada yang tahu –namanya saja intelijen negara. Memang izin melakukan penyadapan itu ketat. Hanya untuk orang tertentu dengan sasaran orang tertentu menggunakan prosedur tertentu. Tapi karena banyak instansi yang mendapat izin akhirnya diperlukan lebih banyak tim penyadap. Ujung-ujungnya sedap: presiden pun disadap. (*)

Roy Suryo...

dari halaman 1

Roy Suryo tampak tertawa ketika Jokowi membalikkan badan ke arah pengunjung sidang dan menunjukkan satu per satu ijazah asli miliknya. Mulai ijazah SD, SMP, SMA, sampai S1. " Itu (pengunjung sidang, red) teriak-teriak keluarkan, yang mulia, keluarkan tuh, palsu kok teriak-teriak," seru Roy Suryo. Kepada majelis hakim, Jokowi memohon izin agar diperkenankan menunjukkan ijazah S1 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sudah dia bawa. Dia mengaku sudah berjanji menunjukkan ijazah tersebut kepada publik. Janji itu lantas ditunaikan oleh Jokowi. " Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya," kata dia di muka persidangan.

Setelah diizinkan oleh majelis hakim, Jokowi lantas beranjak dari kursi saksi. Dia berdiri dan membalikan badan ke arah pengunjung sidang. Kemudian Jokowi menunjukkan satu per satu dokumen ijazah yang dia bawa. Berurutan mulai ijazah SD, SMP, SMA, sampai S1. Saat tiba di PN Jaktim sekitar pukul 08.30 WIB. Jokowi memang sudah siap menjalani sidang. Dia menyatakan bahwa semua dokumen yang dibutuhkan sudah dibawa. Termasuk ijazah asli yang selama ini menjadi persoalan dan terus dibahas oleh Roy Suryo. " Bawa (dokumen ijazah), bawa semua," kata Jokowi singkat.

Jokowi hadir dalam persidangan hari ini sebagai saksi korban. Dia melaporkan Roy Suryo dan beberapa pihak lainnya ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Jokowi melapor secara langsung ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya dan langsung menjalani pemeriksaan sebagai pelapor. (*)

Kini Layanan...

dari halaman 1

"Di pasar murah ini, masyarakat juga bisa sekaligus membayar pajak kendaraan bermotor. Kami selalu menghadirkan mobil Samsat setiap ada pelaksanaan pasar murah agar masyarakat lebih mudah dan dekat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan," ujar Idah.

Wagub Idah juga turut menyapa masyarakat pada saat pendaftaran kupon untuk antrian berbelanja di pasar murah. Ia menambahkan, masyarakat yang membayar pajak kendaraan di lokasi pasar murah mendapatkan bonus kupon belanja. Dengan kupon tersebut, mereka bisa langsung berbelanja tanpa harus mengikuti antrean pembeli lainnya. Idah berharap kehadiran pasar murah yang dipadukan dengan pelayanan Samsat dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau sekaligus membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Adapun tujuh komoditas yang disediakan dalam pasar murah tersebut meliputi beras 5 kilogram seharga Rp25 ribu, minyak goreng Rp10 ribu per liter, cabai rawit Rp10 ribu per 0,25 kilogram, bawang merah Rp10 ribu per 0,5 kilogram, gula pasir Rp10 ribu per kilogram, telur Rp10 ribu per 10 butir, serta ayam pedaging Rp20 ribu per ekor. Seluruh komoditas tersebut dapat ditebus masyarakat dengan harga paket Rp95 ribu. **(tro/*)**

HARIAN PAGI PERTAMA DAN TERBESAR DI GORONTALO
GORONTALO POST

Penerbit	:	**PT. GORONTALO CEMERLANG**
Pembina	:	Dahlan Iskan
Komisaris Utama	:	Imawan Mashuri
Komisaris	:	Urief Hasan
Direktur Utama	:	Moh. Sirham
Direktur	:	Haryono
Direktur Marketing	:	Hariyanto Hamzah
Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab	:	Jitro Paputungan

DIVISI PRODUKSI
Redaktur Pelaksana: Roy Tilameo, Rahmat Malik.
Redaktur: Zulkifli Tampolo. **Staf Redaksi:** Caisar Ntoma, Diyanti T. Niyode, M Sonatha
Sekretaris Redaksi/HRD: Chicilia Noviastuti Arifin. **IT:** Luki

DIVISI ART & PERWAJAHAN
Risdiyanto Karim, Nasir Hantono, Apri Ahmad. **Design Grafis:** Muhammad Syukri

DIVISI USAHA
Manager Keuangan: Elvin Ambo. Adriyanti Kadir **(adm)**. **Manager Iklan:** Hariyanto Hamzah.
Staf Iklan: Aminum Humola, Surya Muhamad.

Manager Sirkulasi & Pemasaran: Yusuf Saleh**. Pemasaran Koran:** Buyung Tanjung, Yersi Ismail, Welniaty Ahaya **(adm).**

LAYANAN PELANGGAN DAN IKLAN
Tarif Iklan: Umum Rp. 30.000,-/mmk (hitam putih/BW), Rp 40.000,-mmk (berwarna/FC). **Mungil:** Rp 35.000 (satu kali muat). **Advertorial:** Rp 22.500,-mmk (berwarna), Rp 15.000,-mmk (hitam putih/BW). **Harga Langganan Koran:** Rp 150.000 (luar kota tambah ongkos kirim)

ALAMAT
Kantor Pusat: GEDUNG GRAHA PENA GORONTALO
Jln. Jhon A. Katili (Eks Jln. Andalas). No. 144 Kota Gorontalo. Telepon: (0435) 827551.
E-mail Redaksi: redaksi_gp@yahoo.com, redaksi.gpost@gmail.com, Hargo.co.id.
E-mail Iklan: iklan_gp@yahoo.com, iklangp@yahoo.com. E-mail Sirkulasi & Pemasaran: marketing_gp@ymail.com.

Perwakilan Jakarta: Jln. Kebayoran Lama no. 12 Jakarta Barat.
Surabaya: Jln Ketintang Permai, Blok BD No. 17, Kota Surabaya, Jawa TImur.

Redaksi menerima tulisan karya asli, terjemahan, atau saduran (dengan menyebutkan sumber asli bagi karya terjemahan dan saduran). Panjang tulisan antara tiga sampai empat halaman A4 spasi 1,5 dalam bentuk softcopy dan menyertakan identitas diri. Redaksi berhak tidak menerbitkan tulisan yang terkirim, isi tulisan sepenuhnya tanggungjawab penulis. ■ Wartawan Gorontalo Post dibekali dengan kartu pers/surat keterangan ketika menjalankan tugas. ■ Jika ada kekeliruan baik tentang identitas atau tindakan wartawan dapat menghubungi redaksi Gorontalo Post.

Cegah Pernikahan Dini dan Stunting

Poltekkes Kemenkes Gorontalo Edukasi Remaja di Tabumela

GORONTALO -GP- Upaya mencegah pernikahan dini dan menekan risiko stunting terus digencarkan melalui edukasi langsung kepada kalangan remaja. Kali ini, Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Gorontalo menggelar edukasi BAPERAN (Bahaya Pernikahan Dini) di Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Kemitraan Masyarakat (PKM) tersebut dilaksanakan bersama Karang Taruna setempat dan diikuti 25 peserta, terdiri atas 12 remaja putri dan 13 anggota Karang Taruna.

Menariknya, sebelum penyampaian materi, tim pengabdian masyarakat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 12 remaja putri. Pemeriksaan meliputi berat badan, Lingkar Lengan Atas (LILA), tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, respirasi, hingga kadar hemoglobin.

Hasil pemeriksaan menemukan empat remaja putri atau 33,3 persen memiliki ukuran LILA di bawah 23,5 sentimeter yang mengindikasikan risiko Kurang Energi Kronik (KEK). Selain itu, satu remaja atau 8,3 persen diketahui mengalami anemia.

Remaja yang terindikasi memiliki risiko kesehatan tersebut akan ditindaklanjuti oleh bidan desa melalui layanan kesehatan primer.

Setelah pemeriksaan, peserta mengikuti edukasi melalui ceramah interaktif menggunakan media presentasi dan booklet. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi serta sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai bahaya pernikahan dini dan kaitannya dengan kesehatan reproduksi.

Dampak edukasi terlihat dari hasil evaluasi pengetahuan peserta. Rata-rata nilai pre-test yang sebelumnya mencapai 56,4 persen meningkat menjadi 89,6 persen pada post-test. Bahkan, seluruh peserta berhasil mencapai skor minimal 70.

Ketua tim pelaksana, Yollanda Dwi Santi Violentina, S.ST., M.Keb., menjelaskan bahwa pernikahan dini pada remaja putri dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan serta berkontribusi terhadap risiko stunting pada bayi yang dilahirkan.



Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Gorontalo menggelar edukasi BAPERAN di Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Kamis (9/7/2026)

Karena itu, menurutnya, pemahaman mengenai kesiapan kesehatan reproduksi menjadi hal penting sebelum seseorang memasuki kehamilan.

Meski menunjukkan peningkatan pengetahuan yang cukup signifikan, tim pelaksana menegaskan bahwa hasil evaluasi tersebut masih bersifat deskriptif.

Pengukuran baru mencakup peningkatan pengetahuan peserta, belum sampai pada perubahan perilaku maupun penurunan angka pernikahan dini.

Sebagai tindak lanjut, tim berencana melakukan monitoring dan evaluasi melalui pengembangan pojok konsultasi remaja serta grup komunikasi daring bersama Karang Taruna.

Langkah tersebut diharapkan menjadi sarana pendampingan berkelanjutan agar edukasi mengenai bahaya pernikahan dini tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi terus menjadi perhatian dan pemahaman di kalangan remaja. **(ADV/roy)**

Gerai UMKM Telaga Segera Dibuka

LIMBOTO Produk pangan olahan yang akan mengisi gerai UMKM Kabupaten Gorontalo wajib memenuhi standar keamanan pangan dan persyaratan administrasi. Pemerintah daerah tidak ingin gerai yang disiapkan sebagai etalase produk lokal justru diisi produk yang belum terjamin kelayakannya.

Persyaratan tersebut menjadi perhatian dalam pembinaan pelaku industri rumah tangga pangan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Kamis (5/11/2026). Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengatakan, gerai UMKM yang dibangun di kawasan Telaga direncanakan diresmikan pada 26 November 2026, bertepatan dengan peringatan HUT Kabupaten Gorontalo.

Gerai tersebut akan menjadi ruang promosi sekaligus tempat pemasaran produk unggulan UMKM daerah. Namun, pelaku usaha harus memastikan produk yang ditawarkan memenuhi ketentuan administrasi dan standar kelayakan pangan.

"Persyaratan administrasi dan kelayakan produk harus dipenuhi agar produk yang ditampilkan benar-benar berkualitas," tegas Sofyan saat membuka kegiatan tersebut.

Menurutnya, pengembangan UMKM merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah sejak 2025. Dukungan terhadap sektor ini bahkan diharapkan meningkat melalui



Sofyan Puhi

penguatan anggaran pada 2027.

Karena itu, pembinaan terhadap pelaku usaha tidak cukup hanya mendorong peningkatan produksi dan pemasaran. Aspek keamanan pangan juga harus menjadi perhatian, terutama bagi usaha yang menghasilkan makanan dan minuman olahan.

Melalui bimtek CPPOB, pelaku usaha dibekali pemahaman mengenai standar kebersihan tempat dan peralatan produksi, pengolahan bahan pangan, serta penerapan prinsip keamanan pangan. Pemenuhan standar tersebut diharapkan tidak hanya membuka peluang produk UMKM masuk ke gerai daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pemasaran. Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi terus mendorong pendampingan agar pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan produksi pangan yang baik. **(tro)**

Pasar Murah Bantu Ringankan Beban Warga

Harga Sembako Rp275 Ribu Dijual Rp95 Ribu

GORONTALO - Warga cukup membayar Rp95 ribu untuk mendapatkan paket sembako yang nilai normalnya mencapai Rp275 ribu. Artinya, pemerintah menyubsidi Rp180 ribu untuk setiap paket dalam pasar murah yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Kamis (5/11/2026).

Sebanyak 1.500 paket disiapkan dalam kegiatan yang digelar Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tersebut. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah tekanan ekonomi akibat kemarau berkepanjangan. Setiap paket berisi beras lima kilogram, telur 10 butir, minyak goreng satu liter, gula pasir satu kilogram, cabai rawit seperempat kilogram, bawang merah setengah kilogram, serta satu ekor ayam pedaging.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan, pasar murah bersubsidi merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk meringankan beban belanja rumah tangga, terutama masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, pelaksanaan program tersebut juga dilakukan melalui



(FOTO: DOK-PEMPROV)

PASAR MURAH - Warga berebut kebutuhan pokok yang dijual murah oleh pemerintah dalam rangkaian pasar murah, berlangsung di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Kamis (5/11).

koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami datang untuk melaksanakan pasar murah dengan tujuan meringankan beban masyarakat, khususnya di tengah kondisi musim kemarau berkepanjangan yang kita alami saat ini," kata Gusnar.

Pasar murah tersebut dibuka langsung oleh Gusnar bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie. Dalam kesempatan itu, Gusnar juga mengimbau masyarakat mengikuti kegiatan dengan tertib serta berharap kemarau panjang segera berakhir dan hujan kembali turun. **(tro)**



Helikopter Padamkan Karhutlah Jatuh

Dua Prajurit TNI Meninggal Dunia

JAKARTA- Dua prajurit TNI AD dinyatakan gugur dalam peristiwa helikopter Mi 17V5 yang jatuh di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11). Dalam siaran pers resmi TNI AD yang diterima di Jakarta, Kamis, dua prajurit yang dinyatakan gugur adalah Mayor CPN Dudi dan Lettu CPN Hafiz. Jenazah keduanya telah dievakuasi ke RSUD Kuala Pembuang.

Sementara, lima personel lain berhasil diselamatkan. Mereka terdiri dari Kapten CPN Febri, Letda CPN Fercis, Pratu Gilang, Serka Kadiya, dan Kapten CPN Suganda. Lima personel tersebut masih menjalani perawatan di RSUD Kuala Pembuang. "Adapun satu orang kru lainnya, Serda Heri masih belum dapat dievakuasi karena kondisi air sedang pasang," demikian siaran pers itu. Peristiwa kecelakaan Helikopter Mi 17V5 dari Pusat Penerbang Angkatan Darat (Puspenerbad) itu terjadi sekira pukul 11.18 WIB

Kecelakaan bermula ketika helikopter lepas landas dari Kuala Pembuang pukul 09.55 WIB. Para prajurit dalam helikopter Mi 17V5 tersebut bertugas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Saat mengambil air di perairan Desa Sungai Perlu untuk operasi water bombing, helikopter mengalami kendala terbang dan jatuh di ke perairan.

Sesaat setelah peristiwa itu, TNI AD langsung mengirimkan personel untuk mengevakuasi para kru lewat jalur udara. "Upaya penyelamatan tersebut diprioritaskan untuk memastikan seluruh personel mendapatkan pertolongan secepatnya," demikian siaran pers TNI AD tersebut. **(antara)**



(ANTARA/I.C. SENJAYA)

Upacara pemakaman, Kapten Cpn (Anm) Nurhafiz Akbar, salah satu personel TNI yang meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter MI-17V5 saat operasi pemadaman Karhutla di Kalteng, di TMP Giri Tunggal Semarang, Kamis (5/11).



(FOTO: DOK-)

Sejumlah koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) Watch menyegel Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Dua Mantan Pejabat KPK Masuk BGN

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola kelembagaan guna memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan secara transparan dan akuntabel. Salah satu langkah yang ditempuh dengan melibatkan dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan lembaga tersebut. Dua mantan personel KPK yang kini bertugas di BGN tersebut adalah Mungki Hadipratikno, yang sebelumnya menjabat Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi), serta Haerudin, mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penugasan kedua personel tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem kelembagaan BGN. Terutama dalam membangun mekanisme pengelolaan



Budi Prasetyo

yang menjunjung tinggi integritas dan mengutamakan pencegahan tindak pidana korupsi. "Penugasan personel insan KPK ke Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan, khususnya dalam membangun sistem tata kelola yang berintegritas dan mengedepankan prinsip-prinsip pencegahan korupsi," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/11).

Budi menjelaskan, penugasan tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan sinergi dan koordinasi antarlembaga. Kerja sama ini dinilai penting untuk memastikan rekomendasi KPK terkait hasil kajian terhadap potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan Program MBG dapat dijalankan secara maksimal.

Mengingat, KPK telah melakukan kajian terhadap pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut. Kajian itu bertujuan mengidentifikasi sejumlah titik rawan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengelolaannya. Hasil kajian tersebut kemudian disampaikan kepada BGN untuk ditindaklanjuti melalui pembenahan tata kelola. Dalam hal ini, keberadaan dua mantan personel KPK diharapkan dapat membantu mengawal proses perbaikan sekaligus memastikan rekomendasi yang telah diberikan tidak sekadar menjadi catatan administratif. "Sehingga, upaya pencegahan tidak berhenti pada identifikasi potensi risiko, tetapi berlanjut pada langkah-langkah perbaikan sistem yang konkret dan berkelanjutan," tegasnya. Penguatan pengawasan sejak tahap awal menjadi faktor penting agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Setiap tahapan, mulai dari pengelolaan anggaran, distribusi, hingga pelaksanaan program di lapangan, membutuhkan sistem kontrol yang memadai serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Terlebih, MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan jangkauan penerima manfaat dalam skala besar. Besarnya cakupan program tersebut membuat aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan penggunaan anggaran menjadi perhatian penting. **(jp)**

JUAL MOBIL/MOTOR
HONDA-CB-150 R STREETFIRE
2018 DM2118HP
DAIHATSU-ALLNEWAYLA-
R 1.2 AT 2023 DB1103RR
YAMAHA-MT-15
2019 DM3244JN
HONDA-GENIO-CBS
2024 DM2394LC
DAIHATSU TERIOS TX 1.5 MT
2009 DM1197FC
TOYOTA-GRAND NEW INNOVA-
BENSIN G 2.0 MT DF
2014 DB1589GC
Hubungi :
0435 828080

Foto Wapres Gibran Diturunkan, Sri Sultan: Jangan

YOGYAKARTA - Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ruang Badan Anggaran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta diturunkan pada Rabu (4/11). Pencopotan itu dilakukan oleh Forum Kebangsaan DIY setelah mereka menggelar audiensi dengan DPRD DIY. Dalam pertemuan tersebut Forum Kebangsaan DIY membawa sejumlah tuntutan yang disampaikan lewat anggota dewan. Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik mengatakan bahwa aksi pencopotan foto Gibran merupakan inisiatif peserta audiensi dari Forum Kebangsaan DIY. â€œTindakan penurunan foto itu secara spontanitas dari peserta audiensi yang maju ke depan," katanya. Dia menegaskan bahwa aksi pencopotan foto wapres di luar kendali pihaknya.

"Jadi, bukan inisiatif dari anggota dewan,â€ kata Imam. DPRD DIY menekankan tindakan maupun pernyataan individu tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai sikap atau keputusan kelembagaan. Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan selama pejabat yang bersangkutan masih menjabat, maka aksi penurunan tersebut tidak bisa dibenarkan.

"Selama wakil presiden belum turun atau belum berganti, ya, jangan (menurunkan foto)," kata Sri Sultan. Ia mengimbau agar pihak manapun tidak melakukan tindakan yang bisa memicu kesalahpahaman atau perpecahan. **(mcr25/jpnn)**



Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Wapres Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (4/11).

Eks Ketua Ombudsman Divonis Lima Tahun

JAKARTA - Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (5/11). Hery Susanto dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait pengaturan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2023.

"Menyatakan Terdakwa Herry Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Dwi Elyarahma Sulistyowati membacakan amar putusan. "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herry Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun," sambungnya.

Selain pidana badan, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider 100 hari kurangan. Pidana denda itu harus dibayarkan setelah satu bulan berkekuatan hukum tetap.

Hery juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 3.875.000.000. Hakim turut memperhitungkan rumah yang terletak di Pulogadung, Blok D5 nomor 10, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai pembayaran uang pengganti. Hakim menegaskan, pembayaran uang pengganti itu harus dibayarkan selambatnya selama satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jika tidak dibayarkan, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. "Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan penjara pidana penjara selama 3 (tiga) tahun," ucap Hakim.

Hery Susanto terbukti menerima suap dengan total nilai sekitar Rp 4,8 miliar. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengaturan tata kelola pertambangan nikel pada periode 2013-2025. Hery disebut memanfaatkan kewenangannya untuk memberikan rekomendasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum dalam proses pengaturan LHP tata kelola pertambangan nikel. **(jp)**



(ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO)

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto (tengah) meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

RENCANA KEBUTUHAN OBAT

Sekda Minta Puskesmas Benahi Perencanaan

LIMBOTO- Persoalan ketersediaan obat di 23 Puskesmas Kabupaten Gorontalo menjadi perhatian Dinas Kesehatan. Di satu sisi, sejumlah obat berisiko menumpuk hingga kedaluwarsa, sementara jenis obat yang dibutuhkan pasien justru mengalami kekosongan. Masalah tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Gorontalo membenahi perencanaan kebutuhan obat melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) berbasis data, bukan sekadar perkiraan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menegaskan bahwa perencanaan yang tidak akurat berpotensi memicu dua persoalan sekaligus: kekosongan obat esensial yang mengganggu pelayanan kesehatan dan pemborosan anggaran akibat persediaan berlebih. "Perencanaan kebutuhan obat harus mengacu pada data riil dan sesuai kebutuhan pelayanan," menjadi penekanan Sugondo saat membawakan materi arah kebijakan daerah dalam kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kepatuhan RKO di Grand Q Hotel, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, ketersediaan dan keterjangkauan obat di Puskesmas maupun rumah sakit merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk itu, pengelolaan obat harus diperkuat melalui pemanfaatan data konsumsi dalam Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO), integrasi pelaporan elektronik melalui e-MONEV, serta optimalisasi penggunaan e-Katalog.

Pengelola obat juga diminta menerapkan prinsip First Expired, First Out (FEFO) dan First In, First Out (FIFO) agar persediaan terkontrol dan risiko obat kedaluwarsa dapat ditekan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Afriyani Katili, mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah pengajuan kebutuhan obat dari Puskesmas yang masih dilakukan secara manual.

Padahal, sistem pelaporan yang terintegrasi dengan e-MONEV telah tersedia di tingkat Dinas Kesehatan. Kesenjangan sistem tersebut membuat proses pengusulan dari Puskesmas belum berjalan secara terintegrasi.

Karena itu, Dinas Kesehatan membutuhkan dukungan pengembangan aplikasi sederhana untuk mempermudah pengajuan, pengolahan data, dan perencanaan kebutuhan obat dari seluruh Puskesmas.

Pembenahan ini menjadi fokus kegiatan pembinaan dan evaluasi yang diikuti sekitar 154 peserta, terdiri atas pengelola obat dari 23 Puskesmas dan penanggung jawab program terkait di Dinas Kesehatan.

Sugondo juga meminta Dinas Kesehatan mendampingi secara intensif Puskesmas yang masih rendah kepatuhannya dalam pelaporan LPLPO. Penyusunan kebutuhan obat harus melibatkan petugas farmasi, dokter, serta pemegang program agar usulan benar-benar mencerminkan kebutuhan pelayanan. Kepala Puskesmas juga diminta bertanggung jawab terhadap pengelolaan kebutuhan obat di fasilitas masing-masing.

Pembenahan RKO diharapkan tidak berhenti pada kepatuhan administrasi, tetapi mampu memastikan obat yang dibutuhkan masyarakat tersedia dalam jumlah tepat, tanpa menimbulkan penumpukan persediaan yang berujung pemborosan.**(adv)**



(FOTO: DOK-DISKOMINFO)

Sekda Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur saat membawakan materi arah kebijakan daerah dalam kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kepatuhan RKO di Grand Q Hotel, Kamis (5/11).



(FOTO: DOK-DISKOMINFO)

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menyerahkan secara simbolis bagi petani di wilayah Telaga Cs, Kamis (5/11).

Bupati Kucur Rp 4,28 M ke Petani Telaga Cs

Benih Jagung hingga Alsintan Dibagikan

LIMBOTO- Petani di empat kecamatan Kabupaten Gorontalo mendapat suntikan bantuan pertanian senilai Rp4,28 miliar. Bantuan dari APBD Tahun Anggaran 2026 itu menyasar Kecamatan Telaga Biru, Telaga, Telaga Jaya, dan Tilango, melalui program benih jagung, pengembangan perkebunan kelapa, serta pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menyerahkan bantuan tersebut, Kamis (5/11/2026). Alokasi terbesar berada di wilayah Telaga, Telaga Jaya, dan Tilango dengan nilai Rp2,51 miliar. Sementara Telaga Biru memperoleh Rp1,76 miliar.

Dari tiga program yang disalurkan, bantuan benih jagung menjadi salah satu komponen utama. Telaga Biru mendapat 11,94 ton benih untuk lahan seluas 796 hektare dengan nilai Rp1,194 miliar. Kecamatan Telaga memperoleh 9,76 ton untuk lahan 651 hektare senilai Rp976,5 juta. Benih varietas DK 9209C dan Pioneer P-27 tersebut dilaporkan telah tersalurkan 100 persen di kedua kecamatan. Selain jagung, pemerintah daerah mengalokasikan bantuan untuk pengembangan perkebunan kelapa. Di Telaga Biru, bantuan senilai Rp162,7 juta mencakup 3.960 bibit kelapa, 11,88 ton pupuk organik, serta biaya pengolahan lahan seluas 36 hektare bagi tiga kelompok tani. Sementara di Kecamatan Telaga, program senilai Rp406,77 juta menyasar 10 kelompok tani. Bantuan terdiri atas 9.900 bibit kelapa, 29,7 ton pupuk organik, dan biaya pengolahan lahan seluas 90 hektare.

Dukungan mekanisasi pertanian juga diberikan melalui distribusi alsintan. Telaga Biru menerima tiga unit senilai Rp412,81 juta, terdiri atas satu traktor roda dua, satu traktor roda empat, dan satu pompa air.

Adapun Telaga, Telaga Jaya, dan Tilango memperoleh 19 unit alsintan senilai sekitar Rp1,13 miliar. Bantuan tersebut terdiri atas tujuh traktor roda dua, dua traktor roda empat, dan 10 pompa air untuk 19 kelompok tani. Secara keseluruhan, bantuan tersebut diarahkan untuk memperkuat produksi pertanian, memperluas pengembangan perkebunan kelapa, dan mengurangi ketergantungan petani pada peralatan manual. **(adv)**

TRIPUTRA IMPROVEMENT FORUM XXI

Daya Group Raih Juara Umum, PT DAW Sumbang Tiga Prestasi

MANADO - Daya Group kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih 1st Winner Excellence Company Award atau juara umum pada ajang Triputra Improvement Forum (TIF) XXI yang diselenggarakan pada 17 Oktober 2026. Pencapaian ini sekaligus mengukuhkan Daya Group sebagai back-to-back champion setelah meraih penghargaan yang sama pada 2025 dan 2026.

Prestasi tersebut menjadi bukti komitmen Daya Group dalam membangun budaya inovasi dan continuous improvement melalui berbagai inisiatif perbaikan yang dijalankan oleh insan perusahaan. Dalam ajang ini, sejumlah tim dan individu dari berbagai entitas Daya Group berhasil meraih penghargaan di beragam kategori.



(FOTO: DOK-DAW)

TRIPUTRA GROUP - PT Daya Adicipta Wisesa (DAW) turut menorehkan prestrasi pada ajang Triputra Improvement Forum XXI yang berlangsung 17 Oktober 2026.

Sebagai bagian dari Daya Group, PT Daya Adicipta Wisesa (DAW), Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, turut berkontribusi melalui tiga pencapaian, yaitu Juara 2 InTEKS oleh Tim Selebgram, Juara 3 PPS 2.0 oleh Panji Sapta Pratama, serta Juara 3 Support Operation (SO) oleh Tim Fighter.

Sub Division Head HR&GA PT Daya Adicipta Wisesa, Iwan Trisula, menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi motivasi bagi seluruh insan perusahaan untuk terus mengembangkan potensi dan menghasilkan inovasi yang memberikan nilai tambah.

"Keberhasilan Daya Group mempertahankan posisi sebagai juara umum selama dua tahun berturut-turut merupakan pencapaian yang membanggakan. Bagi PT DAW, prestasi ini menjadi motivasi untuk terus membangun budaya improvement, memperkuat kolaborasi, serta mendorong setiap insan perusahaan agar berani menghadirkan ide dan solusi yang berdampak positif bagi perusahaan," ujar Iwan.

Melalui partisipasi dalam Triputra Improvement Forum XXI, PT DAW terus mendukung pengembangan budaya perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas proses kerja dan kualitas operasional. Semangat ini diharapkan dapat mendorong lahirnya berbagai inovasi yang relevan dengan kebutuhan bisnis serta memberikan kontribusi berkelanjutan bagi perusahaan. Pencapaian Daya Group sebagai back-to-back champion menjadi inspirasi bagi seluruh Insan Daya untuk terus berkolaborasi, berinovasi, dan memberikan karya terbaik dalam setiap aspek pekerjaan. **(tro)**

Realisasi PAD Kota Gorontalo Belum Maksimal



(F. DIYANTI/GORONTALO POST)

Dokumentasi rapat Banggar Dekot dengan TAPD Pemkot, Senin (2/11/2026).

Komisi II Minta OPD Pengampu Pendapatan Genjot Penerimaan



Herman Haluti

GORONTALO-GP- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo memasuki fase krusial. Memasuki dua bulan terakhir tahun anggaran 2026, realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah masih membutuhkan perhatian serius. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu pendapatan pun diminta segera mengambil langkah konkret untuk mengejar target yang telah ditetapkan.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Herman Haluti, menegaskan sisa waktu yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap penerimaan tidak boleh hanya menyampaikan laporan capaian, tetapi harus menunjukkan upaya nyata dalam meningkatkan pendapatan. Penegasan tersebut disampaikan Herman saat memimpin rapat kerja Komisi II Dekot terkait evaluasi PAD tahun anggaran 2026 di aula utama DPRD Kota Gorontalo, Selasa (3/11/2026).

Ia mengatakan, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan penerimaan daerah sekaligus mengidentifikasi sektor yang masih membutuhkan perhatian. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menentukan langkah yang lebih tepat dalam mengoptimalkan sisa waktu tahun anggaran.

Herman juga menekankan pentingnya keseriusan seluruh OPD pengampu pendapatan dalam menjalankan tugasnya. Sebab, pencapaian target PAD membutuhkan kerja yang terukur, mulai dari pendataan potensi, pengawasan hingga penagihan kepada wajib pajak dan retribusi.Dalam fungsi pengawasannya, Komisi II turut meminta Badan Keuangan Kota Gorontalo melakukan pendataan terhadap realisasi keuangan kegiatan yang bersumber dari PAD."Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pendapatan yang berhasil dihimpun pemerintah daerah benar-benar terukur pemanfaatannya dalam pembiayaan program pembangunan," kata Herman.

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta menyusun dan menyampaikan progres capaian PAD dari sektor pajak hingga posisi 31 Desember 2026. Herman menginginkan perkembangan penerimaan tersebut dapat dipantau secara jelas sehingga setiap kendala yang muncul bisa segera ditindaklanjuti.

Data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per kecamatan hingga Oktober 2026 memperlihatkan perbedaan capaian yang cukup mencolok. Kecamatan Kota Barat menjadi wilayah dengan realisasi tertinggi, yakni 102,36 persen. Disusul Dumbo Raya sebesar 99,06 persen dan Kota Timur 99,03 persen.Sementara itu, sejumlah kecamatan lainnya masih belum mencapai target. Kecamatan Sipatana, misalnya, baru mencatatkan realisasi 65,78 persen. Artinya, masih terdapat selisih 34,22 poin persentase yang harus dikejar hingga akhir tahun anggaran.Menurut Herman, perbedaan capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Kecamatan yang realisasinya masih rendah perlu ditelusuri penyebabnya, sehingga upaya peningkatan penerimaan tidak hanya dilakukan secara umum, tetapi disesuaikan dengan persoalan di masing-masing wilayah.

Ia juga meminta Bapenda memberikan penjelasan mengenai strategi penagihan, efektivitas pendataan wajib pajak, serta langkah penyelesaian tunggakan. Dengan demikian, Komisi II dapat mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mengejar target penerimaan.Dua bulan terakhir tahun anggaran 2026 menjadi momentum penting untuk mengukur keseriusan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD. Sebab, peningkatan pendapatan bukan hanya persoalan mengejar angka target, melainkan juga menyangkut kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari luar daerah. **(Adv)**

Irwan Perkuat Kolaborasi Cegah Peredaran Narkoba



Irwan Hunawa

GORONTALO-GP- Upaya menekan peredaran narkoba di Kota Gorontalo terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

Menurut Ketua Dekot Gorontalo, Irwan Hunawa, persoalan narkoba merupakan isu besar yang tidak bisa ditangani oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi semua pihak agar upaya pencegahan dapat berjalan efektif.

"Penanganan narkoba ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu lembaga. Harus ada kolaborasi dan sinergi untuk menciptakan Kota Gorontalo yang bebas narkoba," ujarnya.

Lanjut Irwan menjelaskan, salah satu langkah yang terus didorong adalah mempersempit ruang gerak peredaran narkoba melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah kota, kata dia, selama ini telah memfasilitasi edukasi tersebut dalam berbagai pertemuan bersama warga.

"Setiap ada pertemuan antara pemerintah dan masyarakat, selalu disisipkan sosialisasi terkait bahaya narkoba. Ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat," jelasnya.

Meski demikian, Irwan mengakui bahwa upaya pemberantasan narkoba bukan perkara mudah. Pasalnya, setiap langkah penekanan yang dilakukan pemerintah seringkali diikuti dengan berbagai cara baru dari pelaku untuk memperluas jaringan peredaran.

"Ini yang membuat kita harus terus bergerak bersama. Karena ketika ada upaya pengurangan, mereka juga mencari cara untuk menyebarluaskan," tambahnya.

Sebagai bentuk penguatan kolaborasi, Dekot Gorontalo berencana melibatkan BNN secara langsung dalam kegiatan reses. Dalam kegiatan tersebut, BNN akan diberikan ruang untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba.

"Kami akan mengundang BNN dalam setiap kegiatan reses, agar mereka bisa langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena mereka memiliki kewenangan dan penanganan khusus di bidang ini," tegas Irwan.

Ia berharap, dengan sinergi yang terus dibangun, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota Gorontalo dapat berjalan lebih optimal.

"Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita semua punya peran dalam mewujudkan Kota Gorontalo yang bebas dari narkoba," pungkasnya**. (Adv)**

Husain Dukung Strategi Walikota Majukan Kota Gorontalo

GORONTALO -GP- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Dekot) Gorontalo, Husain menyampaikan apresiasinya terhadap grand strategi yang akan dijadikan acuan Walikota dalam membangun Kota Gorontalo, menjadi kota jasa, religius dan mandiri. Husain yang juga merupakan Anggota Komisi III Dekot itu mengatakan bahwa strategi tersebut bertujuan agar Gorontalo menjadi kota modern yang tetap berpegang pada nilai-nilai kearifan lokal. Yakni dengan melakukan

peningkatan kemandirian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) berbasis pada pendidikan karakter (akhlak dan kompetensi), pengembangan infrastruktur kota yang handal, wisata religius, serta penciptaan birokrasi yang efektif dan profesional. "Tidak hanya itu, melalui program-program strategis seperti penurunan angka kemiskinan, subsidi untuk penduduk miskin, rehabilitasi rumah tidak layak huni, subsidi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pemasangan listrik bagi keluarga miskin, diharapkan dapat membawa dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Husain.

Legislator partai Demokrasi Indonesia (PDI) perjuangan itu juga menambahkan, sebagai mitra dari ekskutif dirinya memiliki kewajiban untuk turut serta mendukung pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Wali Kota Adhan Dambea dan Wakil Wali Kota Indra Gobel.

"Kota Gorontalo akan menjadi kota jasa dan religius, sejahtera dan mandiri, sesuai dengan visi dan misi yang telah disusun oleh pemerintah kota, dan itu harapan kami," pungkasnya. **(Adv)**



Husain Hasan











KEGIATAN reses Wakil Ketua Deprov Gorontalo Ridwan Monoarfa.

RESES RIDWAN MONOARFA

Optimalkan Potensi Pertanian-Kelautan

PUNCAK BOTU -GP- Wakil Ketua Deprov Ridwan Monoarfa, melaksanakan kegiatan reses di Desa Ilodulunga, Kecamatan Anggrek, Rabu (4/11/2026). Kegiatan reses wakil rakyat Dapil Gorut itu dihadiri oleh perwakilan Kepala Desa Ilodulunga, Ibunda Nurnannhsih Adabi, didampingi aparat desa, di antaranya Ibu Olan Pakaya Eka selaku Bendahara Desa, serta sejumlah masyarakat yang hadir untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan desa.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait pengembangan sektor pertanian, perikanan, infrastruktur, dan ketersediaan air bersih.

Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah permintaan bantuan bibit jagung untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Selain itu, masyarakat juga meminta perhatian terhadap potensi pengembangan budidaya rumput laut yang selama ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga Desa Ilodulunga.

Desa Ilodulunga diketahui memiliki kawasan pesisir pantai dengan luas kurang lebih 150 hektare. Potensi tersebut dinilai sangat besar untuk dikembangkan menjadi kawasan produktif melalui bantuan sarana dan prasarana budidaya rumput laut.

Masyarakat mengungkapkan bahwa usaha rumput laut telah menjadi pekerjaan turun-temurun sejak tahun 1980-an. Namun, hingga saat ini, para pembudidaya masih sangat mengharapkan adanya perhatian dan bantuan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan mereka.

Salah seorang warga, Bapak Kasmat Lahat, menyampaikan keluhan terkait keterbatasan bibit dan persoalan pemasaran hasil panen rumput laut. Ia mengungkapkan bahwa harga jual sering kali tidak stabil dan dinilai dimainkan oleh para tengkulak sehingga berdampak terhadap pendapatan petani. **(rmb)**

RESES LA ODE HAIMUDIN

Serap Aspirasi Warga Tabulo

PUNCAK BOTU -GP- Wakil Ketua Deprov Gorontalo, La Ode Haimudin, melaksanakan kegiatan reses di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Rabu (4/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka secara langsung kepada wakil rakyat. Dalam pertemuan itu, sejumlah aspirasi disampaikan warga, terutama terkait kebutuhan bantuan ekonomi, pendidikan, keagamaan, hingga fasilitas umum.



KEGIATAN reses Wakil Ketua Deprov La Ode Haimudin.

Salah satu usulan yang menjadi perhatian masyarakat adalah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi warga serta membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

Selain sektor ekonomi, masyarakat juga mengusulkan bantuan hibah untuk pembangunan atau pengembangan masjid serta bantuan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa guna mendukung keberlanjutan pendidikan. Warga turut menyampaikan kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah untuk mendukung kebersihan lingkungan. Tak hanya itu, bantuan sarana dan prasarana olahraga juga menjadi aspirasi yang disampaikan agar masyarakat memiliki fasilitas memadai untuk menunjang aktivitas olahraga. **(rmb)**

RESES SULYANTO PATEDA

Warga Keluhkan Bantuan

PUNCAK BOTU -GP- Wakil Ketua Deprov Gorontalo, Sulyanto Pateda, melakukan tatap muka bersama konstituen berlangsung di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Koordinator Kota Gorontalo, Budi Naue. Dalam pertemuan itu, masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.

Salah satu aspirasi disampaikan oleh Rauf Abdul Azis yang mengungkapkan bahwa Kelurahan Limba B masih kerap mengalami persoalan banjir. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius, mengingat banjir sering mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat.

Selain persoalan banjir, Rauf juga menyampaikan bahwa masyarakat Kelurahan Limba B merasa wilayah mereka masih minim mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Sulyanto Pateda menjelaskan berbagai program melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang dapat diusulkan dan diperjuangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun sejumlah program yang dijelaskan meliputi bantuan sembako bagi masyarakat rawan pangan, bantuan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), beasiswa pendidikan bagi mahasiswa jenjang S1 hingga S3, serta bantuan untuk masjid dan majelis taklim.

Sulyanto berharap masyarakat dapat memanfaatkan jalur penyampaian aspirasi tersebut dengan mengusulkan program-program yang benar-benar dibutuhkan, sehingga nantinya dapat diperjuangkan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme penganggaran yang berlaku. **(rmb)**



KEGIATAN reses Wakil Ketua Deprov Sulyanto Pateda.

Kampus Inklusif Tak Cukup Sekadar Terima Mahasiswa

LLDIKTI Ingatkan Pentingnya Layanan bagi Penyandang Disabilitas

GORONTALO-GP- Membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan tinggi belum cukup menjamin terpenuhinya hak mereka sebagai mahasiswa. Perguruan tinggi juga perlu menyiapkan fasilitas, pendampingan, serta sistem pelayanan yang mampu mengakomodasi kebutuhan selama proses perkuliahan.

Hal ini menjadi perhatian Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI Suluttenggo. Kepala LLDIKTI Wilayah XVI, Munawir Sazali Radjak, menilai keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) menjadi salah satu unsur penting dalam membangun lingkungan pendidikan tinggi yang inklusif.

Menurut Munawir, perguruan tinggi memiliki kewajiban menyediakan layanan yang setara bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut telah diatur dalam sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023.

Ia mengapresiasi Universitas Bina Mandiri (UBM) Gorontalo yang telah memiliki ULD. Dari 156 perguruan tinggi di Indonesia yang sudah membentuk unit tersebut, UBM menjadi salah satunya.

"Semua penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan. Bahkan, sudah ada aturan yang mengatur bahwa perguruan tinggi wajib membentuk Unit Layanan Disabilitas," kata Munawir saat ditemui usai Seminar Krisan Fellowship 2026 di Aztin Convention Center, Rabu (4/11).

Ia menjelaskan, pembentukan ULD tidak boleh hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif. Unit tersebut harus benar-benar berfungsi memberikan pelayanan sesuai kebutuhan mahasiswa, termasuk melalui standar operasional prosedur yang jelas.

Sebab, penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas tanpa diikuti fasilitas dan pendampingan yang memadai berpotensi membuat hak mereka belum terpenuhi secara optimal. Karena itu, perguruan tinggi perlu memastikan aksesibilitas lingkungan kampus hingga pelayanan akademik dapat dijangkau seluruh mahasiswa.

Persoalan lainnya adalah masih terbatasnya akses penyandang disabilitas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kondisi ini membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak agar kesempatan memperoleh pendidikan tinggi semakin terbuka.

Kepala Kebijakan Publik Pijar Foundation, Anthony Marwan Darmawan, mengatakan perluasan akses tersebut juga perlu disertai pengenalan mengenai peluang pendidikan tinggi kepada siswa penyandang disabilitas sejak bangku sekolah.

Menurutnya, kehadiran siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam seminar tersebut dapat menjadi kesempatan untuk mengenal lebih jauh lingkungan perguruan tinggi dan peluang melanjutkan pendidikan.

"Harapannya, adik-adik dari SLB bisa mendapatkan inspirasi dan melihat bahwa ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akses mereka terhadap perguruan tinggi masih sangat rendah," ujarnya.

Anthony berharap UBM Gorontalo dapat terus mengembangkan ekosistem kampus inklusif dan membuka kesempatan lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari lingkungan perguruan tinggi.

Baginya, pendidikan inklusif tidak cukup hanya memberikan kesempatan untuk mendaftar dan diterima sebagai mahasiswa. Lebih dari itu, kampus perlu memastikan setiap mahasiswa memperoleh dukungan dan pelayanan yang memungkinkan mereka mengikuti proses pembelajaran secara setara. **(Tr-76)**

COMO PESTA GOL

ARSENAL DAN MAN.CITY MENANG

RANGKAIAN *pertandingan matchday keempat fase liga LigaChampions 2026/2027 telah rampung digelar pada Rabu dan Kamis (4 -5/11) 2026 dini hari WIB.Hasil pekan ini diwarnai oleh berbagai kejutan, termasuk kemenangan bersejarah Como 1907 yang menghancurkan Lens dengan skor mencolok 9-1 di laga tandang, kekalahan Liverpool di markas Fenerbahce, serta kemenangan tipis Manchester City dan Arsenal. Sementara itu, Real Madrid sukses meraih kemenangan dramatis berkat gol penentu di menit-menit akhir.*

HASIL LENGKAP PERTANDINGAN LIGA CHAMPIONS

SOROTAN UTAMA

• Como 1907 mencatat sejarah dengan kemenangan telak 9-1 di markas RC Lens melalui hat-trickTasosDouvikas dan gol-gol dari Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, MattiaLiberali, Martin Baturina, dan MatteoPapaccioli.

• Real Madrid menang dramatis 3-2 atas AEK Athena lewat gol penentu FedericoValverde di menit-menit akhir setelah sebelumnya tertinggal lebih dulu.

• Paris Saint-Germain dan Real Madrid memimpin puncak klasemen sementara dengan poin sempurna (12 poin).



Pertandingan	Skor Akhir
AEK Athens vs Real Madrid	2-3
RC Lens vs Como 1907	1-9
RB Leipzig vs Manchester City	2-3
Slavia Praha vs Arsenal	1-2
Fenerbahce vs Liverpool	3-2
FC Porto vs Napoli	4-1
Borussia Dortmund vs Real Betis	2-1
PSV Eindhoven vs Club Brugge	1-2
Viking FK vs Sabah FK	4-1

Pengedar Narkoba Asal Parimo Dibekuk



(FOTO: DIBUAT AI)

ilustrasi - Penagih hutang yang merampas paksa kendaraan warga di jalan.

Penagih Hutang Rampas Kendaraan, Lapor Polisi

BOALEMO - GP- Kepolisian Polres Boalemo mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan adannya preman yang berkedok penagih hutang atau Debt Colektor (DC). Pesan ini disampaikan menyusul maraknya insiden kekerasan yang dialami warga berupa tindakan penagihan kendaraan yang disertai ancaman, intimidasi, pemaksaan, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

"Kalau ada preman berkedok tukang tagih yang melakukan pemaksaan disertai tindak kekerasan begitu langsung laporkan ke polisi terdekat, nanti akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,"tegas Kasat Reskrim Polres Boalemo Nurwahid Kiayi Demak, S.H., kepada awak media. Nurwahid berharap agar masyarakat tetap mengutamakan penyelesaian persoalan pembiayaan melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku. Setiap pihak harus menghormati hak-hak masyarakat serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

Hal ini seperti yang dialami Anis Akuba (49), warga Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo.Peristiwa tersebut terjadi pada 8 Juni 2026 di wilayah Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta. Saat itu, korban didatangi lima orang yang mengaku sebagai penagih utang terkait tunggakan angsuran satu unit mobil pick-up Suzuki Carry bernomor polisi DM 8041 AN yang pembiayaannya melalui PT Mandiri Utama Finance (PT MUF). Dalam kejadian tersebut, para terlapor diduga berupaya menguasai kendaraan secara paksa dan meminta sejumlah uang tebusan atau biaya penarikan di luar prosedur yang semestinya. Merasa dirugikan dan mendapat tekanan, korban kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. "Polres Boalemo memastikan proses penyidikan akan terus dikembangkan guna mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.Penegakan hukum bukan sekadar tindakan, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman, melindungi hak masyarakat, dan menjaga kepercayaan publik. **(roy)**

Hadapi Potensi Bencana Alam

Kapolda Cek Kesiapan Personel dan Peralatan



Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K mengecek Peralatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam, Rabu (4/11/2026) sore.

GORONTALO - GP- Guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam di wilayah Provinsi Gorontalo, Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., didampingi Dirsamapta Polda Gorontalo Kombes Pol. Satrya Perdana Panuntung Tarung Binti, memimpin Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam secara serentak, Rabu (4/11/2026) sore. Kapolda Gorontalo menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan merupakan tanggung jawab satu instansi semata, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh unsur terkait. Ia mengajak TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, PMI, relawan, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi tanpa adanya sekat antarlembaga, sehingga penanganan bencana, mulai dari evakuasi hingga pendistribusian bantuan, dapat berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Kapolda juga mengingatkan pentingnya melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap kesiapan personel dan peralatan operasional. Kendaraan taktis, perahu karet, alat komunikasi, tenda darurat, perlengkapan kesehatan, hingga kebutuhan logistik harus dipastikan dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat di wilayah rawan bencana serta penguatan sistem peringatan dini juga menjadi perhatian penting guna membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Kapolda turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, pemerintah daerah, Basarnas, PMI, instansi terkait, relawan, media, dan seluruh masyarakat yang selama ini telah menunjukkan kepedulian serta kontribusi dalam membantu penanganan bencana di Provinsi Gorontalo.

Dalam kegiatan tersebut turut digelar berbagai kendaraan dan peralatan pendukung penanggulangan bencana dari masing-masing instansi, di antaranya kendaraan ambulans dan tangki air PMI, mobil pemadam kebakaran, kendaraan patroli Satpol PP, kendaraan operasional dan rescue Basarnas, kendaraan taktis SAR Satbrimob Polda Gorontalo, mobil komando BPBD, serta kendaraan operasional Ditsamapta Polda Gorontalo berupa mobil D-Max, mobil crane, dan mobil Karhutla. **(roy)**

Kelabui Petugas, Selundupkan Sabu di Kotak Tisu

GORONTALO - GP- Beragam modus operandi dilakukan para pengedar narkoba lintas Sulawesi untuk menyelundupkan barang haram tersebut ke Gorontalo. Seperti yang diungkap Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato, yakni penyelundupan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam kotak tisu untuk mengelabui petugas. Dalam kasus ini polisi turut mengamankan seorang pria berinisial R (44), di Jalan Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Kamis (29/10/2026).

Tersangka yang merupakan warga Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, diamankan sekitar pukul 16.30 WITA oleh tim yang dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Pohuwato IPTU Budi Abdul Gani, S.H., didampingi KBO Satresnarkoba IPDA Taufik Maloho, S.H. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi yang diterima petugas sekitar pukul 14.00 WITA mengenai seorang pria yang diduga membawa narkotika jenis sabu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi kendaraan yang digunakan tersangka. Saat dilakukan pemeriksaan di Jalan Desa Sipatana, petugas menemukan empat sachet plastik yang diduga berisi sabu, disembunyikan di dalam kotak tisu dan dibungkus menggunakan plester luka. Kapolres Pohuwato AKBP H. Busroni, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba IPTU Budi Abdul Gani, S.H., mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui barang tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari wilayah Sulawesi Tengah. â€œ Tersangka mengakui barang tersebut miliknya, yang dibeli dari wilayah Sulawesi Tengah,â€ ujar IPTU Budi Abdul Gani. Saat ini, tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Pohuwato untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. **(roy)**



Pria berinisial R (44), dibekuk Satres Narkoba Polres Pohuwato di Jalan Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Kamis (29/10/2026).

Direkrtur Proyek SPPBE Rp 14 Milyar Dibui

BOALEMO, GP- Dugaan penggelapan dana proyek pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT Bumi Panua di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, akhirnya terbongkar. Uang proyek yang telah diserahkan korban mencapai Rp 6,7 miliar dari total nilai kontrak Rp14 miliar. Namun, pembangunan fasilitas energi tersebut justru terbengkalai. Kasus yang menyeret Direktur Utama PT Sherpa Nadya Sejahtera berinisial DY (Darmha Yudi) itu kini memasuki babak hukum. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Boalemo resmi menetapkan DY sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Boalemo.

Kepada wartawan Wakapolres Boalemo Kompol Afandi Nurkamiden, didampingi Kasat Reskrim Iptu Nurwahid Kiayi Demak, S.H menjelaskan, perkara ini bermula dari laporan polisi tertanggal 4 Mei 2026.

Kasat Reskrim Iptu Nurwahid Kiayi Demak mengungkapkan, proyek pembangunan SPPBE tersebut disepakati sejak November 2019 dengan nilai kontrak mencapai Rp14 miliar. Dari nilai kontrak itu, PT Bumi Panua selaku korban telah menyerahkan dana secara bertahap sebesar Rp6,7 miliar.

Namun, dana yang semestinya digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas SPPBE diduga justru dialihkan untuk kepentingan pribadi tersangka di luar pekerjaan proyek. Tak berhenti di situ, penyidik juga menemukan dugaan rekayasa laporan progres pekerjaan. Tersangka diduga memerintahkan anggotanya membuat laporan yang mencantumkan pembelian dan pemasangan sejumlah peralatan penunjang proyek, mulai dari mesin caroussel, conveyor, genset hingga berbagai aksesori pendukung. Faktanya, berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan polisi, sejumlah peralatan tersebut belum terealisasi di lokasi pembangunan. Laporan progres yang diduga tidak sesuai kondisi sebenarnya itu membuat pelaksanaan proyek semakin bermasalah. Akibatnya, pembangunan SPPBE PT Bumi Panua tidak berjalan sebagaimana mestinya hingga akhirnya terbengkalai.

Pihak korban pun terpaksa mengambil alih pekerjaan untuk dilanjutkan oleh pihak lain. Setelah mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperkuat penyidikan dengan keterangan ahli akuntan publik, penyidik menetapkan DY sebagai tersangka melalui Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor .TAP.TSK/48/XI/RES.1.11/2026/ SATRESKRIM tertanggal 2 November 2026. DY dijerat Pasal 486 KUHP tentang penggelapan.

Tersangka kini ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 2 hingga 21 November 2026, untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya bukti transaksi dan slip setoran dari rekening korban ke rekening tersangka maupun perusahaan penyedia, serta dokumen laporan bulanan pekerjaan pembangunan SPPBE periode 11 Februari hingga 6 April 2026**. (roy)**



Wakapolres Boalemo Kompol Afandi Nurkamiden, didampingi Kasat Reskrim Iptu Nurwahid Kiayi Demak, S.H memberikan keterangan kepada awak media di Mapolres Boalemo.

Demokrasi dan Kemanusiaan: Ketika Suara Rakyat Mengoreksi Kekuasaan

Refleksi Pemilu Sela Amerika Serikat dan Nilai-Nilai Universal Politik



Oleh :
Ridwan Monoarfa

DI SELA-SELA kegiatan reses sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo, perhatian saya tertuju pada satu peristiwa politik penting di belahan dunia lain: Pemilu Sela (Midterm Elections) Amerika Serikat yang diselenggarakan pada 3 November 2026. Pemilu ini menghasilkan perubahan besar dalam peta politik Amerika Serikat. Partai Demokrat berhasil merebut mayoritas di DPR dan Senat, mengubah keseimbangan kekuasaan di Kongres dan memberikan konsekuensi politik yang tidak kecil bagi pemerintahan Presiden Donald Trump. Dengan perubahan komposisi tersebut, Demokrat memiliki ruang konstitusional yang lebih besar untuk mengawasi pemerintahan, memengaruhi pembahasan anggaran, serta menentukan arah legislasi nasional.

Namun, bagi saya, Pemilu Sela Amerika Serikat tidak cukup dibaca sebagai kemenangan satu partai dan kekalahan partai lainnya. Ada sesuatu yang lebih mendasar untuk direnungkan: bagaimana demokrasi bekerja, bagaimana rakyat menggunakan hak politiknya, dan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan seharusnya menjadi tujuan dari seluruh proses politik.

Ketertarikan saya terhadap dinamika politik Amerika Serikat bukan sesuatu yang baru. Sejak duduk di bangku SMA, saya telah mengikuti perjalanan politik negara tersebut, mulai dari era Ronald Reagan dari Partai Republik dan Jimmy Carter dari Partai Demokrat. Saya juga pernah menyaksikan secara langsung dinamika Pilpres Amerika Serikat pada 4 November 2008, ketika Barack Obama berhadapan dengan John McCain.

Saat itu, saya mendapat kesempatan berada di Amerika Serikat sebagai representasi gerakan buruh untuk mempelajari partisipasi organisasi pekerja dalam proses politik dan pemilihan presiden. Saya mengunjungi Detroit, Michigan, Virginia, dan Washington. Pengalaman tersebut memberikan perspektif tersendiri tentang bagaimana masyarakat sipil, khususnya gerakan buruh, mengambil bagian dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Dari pengalaman itu saya memahami bahwa demokrasi tidak hanya hidup di gedung parlemen, ruang kampanye, atau bilik suara. Demokrasi juga tumbuh dalam organisasi masyarakat, serikat pekerja, komunitas, keluarga, dan kesadaran warga bahwa masa depan mereka tidak boleh sepenuhnya ditentukan oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan sumber daya ekonomi.

Ketika Politik Kembali Berhadapan dengan Kehidupan Manusia

Salah satu hal menarik dari Pemilu Sela kali ini adalah isu-isu yang menjadi perhatian pemilih. Biaya hidup, inflasi, pekerjaan, pelayanan kesehatan, korupsi, serta perang dan dampaknya terhadap perekonomian menjadi bagian penting dari perdebatan politik.

Kita dapat membaca hasil pemilu ini sebagai cerminan bahwa masyarakat tidak hanya menilai pemerintah berdasarkan retorika dan popularitas pemimpinnya. Mereka juga menilai apakah kebijakan negara mampu menjawab persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Berapa harga yang harus dibayar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga? Apakah pekerjaan yang tersedia memberikan penghidupan layak? Apakah masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa terancam bangkrut? Apakah pemerintah menggunakan uang publik secara bertanggung jawab? Dan sampai kapan masyarakat harus menanggung konsekuensi dari konflik yang tidak mereka kehendaki? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sesungguhnya melampaui batas ideologi dan kepentingan partai politik. Ia menyentuh persoalan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Di sinilah saya melihat bahwa politik seharusnya kembali kepada tujuan awalnya: mengatur kehidupan bersama agar setiap manusia memperoleh kesempatan untuk hidup bermartabat. Demokrasi kehilangan maknanya ketika hanya menjadi prosedur untuk memperoleh kekuasaan, sementara persoalan kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan ditinggalkan. Sebaliknya, demokrasi menemukan maknanya ketika kekuasaan digunakan untuk melindungi kehidupan, memperluas kesempatan, dan memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

Dari Texas dan Michigan: Suara Rakyat dan Kedaulatan Politik

Ada sejumlah peristiwa dalam Pemilu Sela kali ini yang menurut saya layak dicatat sebagai pelajaran demokrasi. Dari Texas, kemenangan Gina Hinojosa dalam pemilihan gubernur menjadi salah satu peristiwa yang menarik perhatian. Ia mencatat sejarah sebagai perempuan Latina pertama yang terpilih menjadi gubernur negara bagian tersebut. Dalam pesan politik kemenangannya, Hinojosa mengangkat pertanyaan mendasar tentang siapa sesungguhnya pemilik negara: rakyat atau kelompok miliarder dan kepentingan ekonomi yang memiliki kemampuan besar membiayai politik? Pesan bahwa Texas adalah milik rakyatnya merupakan pengingat tentang prinsip kedaulatan rakyat. Negara bukan milik pemodal, bukan milik kelompok elite, dan bukan pula milik mereka yang memiliki akses istimewa kepada kekuasaan. Negara adalah milik seluruh warga negara. Pesan tersebut menjadi penting karena demokrasi tidak boleh kehilangan substansi kesetaraannya. Guru, perawat, pekerja, pengemudi, petani, pengusaha kecil, dan orang tua yang berjuang membesarkan anak-anaknya merupakan bagian dari masyarakat yang membangun negara. Kepentingan mereka harus memperoleh tempat dalam kebijakan publik. Pesan lain datang dari James Talarico. Dalam pidato kemenangannya, ia mengangkat pentingnya persatuan, kasih kepada sesama manusia, dan penghormatan terhadap perbedaan. Politik, menurut semangat yang disampaikannya, tidak seharusnya dibangun dengan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci.

Gagasan ini menarik untuk direnungkan. Sebab, demokrasi tidak hanya memberikan hak kepada seseorang untuk berbeda pendapat, tetapi juga menuntut kemampuan untuk menghormati orang lain yang berbeda pilihan, keyakinan, maupun identitas.

Sementara itu, dari Michigan, Abdul El-Sayed membawa perhatian pada persoalan pengaruh uang dalam politik, daya beli masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Pesan yang disuarakannya memperlihatkan bahwa politik harus memiliki hubungan nyata dengan kehidupan masyarakat.

Dalam berbagai pidato kemenangan dan pesan politik tersebut, terdapat satu benang merah yang dapat kita tarik: demokrasi harus memberikan ruang kepada rakyat untuk menentukan arah perubahan, sekaligus memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak tenggelam di tengah besarnya pengaruh modal dan kekuasaan. Tentu, kemenangan elektoral tidak otomatis menjamin seluruh janji politik akan terlaksana. Ujian sesungguhnya justru dimulai setelah kekuasaan diperoleh. Namun, pesan-pesan tersebut memperlihatkan pentingnya partisipasi warga, kesetaraan politik, dan tanggung jawab pemimpin kepada seluruh masyarakat.

Demokrasi Bukan Sekadar Kemenangan, tetapi Juga Pembatasan Kekuasaan

Ada satu pelajaran konstitusional yang juga penting dari Pemilu Sela Amerika Serikat. Dalam sistem presidensial Amerika, pemilihan sela memungkinkan rakyat memberikan penilaian terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, meskipun presiden tidak ikut dipilih kembali. Pemilu ini menjadi mekanisme koreksi di tengah masa jabatan presiden. Kemenangan Demokrat tidak serta-merta mengganti Presiden Donald Trump. Namun, perubahan komposisi Kongres akan mengubah keseimbangan kekuasaan. Pemerintahan harus berhadapan dengan lembaga legislatif yang memiliki mandat politik berbeda. Inilah salah satu esensi demokrasi konstitusional: kekuasaan tidak boleh terkonsentrasi tanpa pengawasan. Presiden memiliki kewenangan, tetapi kewenangan itu dibatasi konstitusi. Parlemen memiliki mandat rakyat untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan mengontrol penggunaan anggaran. Sementara itu, rakyat memiliki hak untuk memberikan penilaian melalui pemilihan umum. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya membutuhkan pemimpin yang memperoleh suara mayoritas. Demokrasi juga membutuhkan lembaga yang kuat, kebebasan sipil, pers yang independen, peradilan yang mandiri, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Kemenangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan hak kelompok yang kalah.

Sebab, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang hanya melindungi mereka yang menang, melainkan demokrasi yang tetap memberikan ruang dan perlindungan kepada semua warga negara. Di sinilah nilai universal demokrasi menemukan maknanya. Kebebasan, kesetaraan, keadilan, penghormatan terhadap perbedaan, dan martabat manusia harus tetap menjadi fondasi kehidupan politik, siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.

Ketika Politik Global Menyentuh Kehidupan Manusia

Dinamika Pemilu Amerika juga mengingatkan kita bahwa keputusan politik sebuah negara tidak selalu berhenti pada batas geografisnya. Dalam dunia yang semakin terhubung, kebijakan energi, perang, perdagangan, dan hubungan internasional dapat menjalar hingga ke kehidupan masyarakat di negara lain.

Konflik Amerika Serikat dan Iran serta ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, misalnya, memperlihatkan bagaimana gangguan pasokan energi dan jalur perdagangan internasional dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian dunia. Dampaknya tidak berhenti di Washington, Teheran, atau kawasan Teluk Persia. Guncangan harga energi dapat menjalar ke negara-negara yang bergantung pada pasokan dan perdagangan internasional. Pada akhirnya, masyarakat biasa sering kali menjadi pihak yang paling cepat merasakan konsekuensi dari keputusan politik yang tidak pernah mereka ikut ambil. Bagi saya, di sinilah politik internasional bertemu dengan persoalan kemanusiaan. Harga energi, ketersediaan pangan, pekerjaan, dan keamanan hidup bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan menyangkut martabat manusia.

Kita mungkin tidak memiliki kendali atas keputusan negara-negara besar. Namun, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami bagaimana keputusan tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat dan bagaimana negara seharusnya melindungi kepentingan rakyatnya. Karena itu, politik tidak boleh hanya dipahami sebagai hubungan antarkekuasaan. Politik juga harus dipahami sebagai tanggung jawab terhadap kehidupan manusia yang berada di balik setiap keputusan.

Mengembalikan Politik kepada Nilai-Nilai Kemanusiaan

Ada hal yang lebih mendasar yang ingin saya tarik dari seluruh peristiwa tersebut.

Kita sering memperdebatkan politik melalui perbedaan ideologi, partai, kepentingan, dan perebutan kekuasaan. Perdebatan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, jangan sampai kita kehilangan kesadaran bahwa di balik semua perbedaan tersebut terdapat manusia yang harus dilindungi kehidupannya.

Seorang ibu yang kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, seorang petani yang menghadapi kenaikan biaya produksi, seorang buruh yang kehilangan pekerjaan, seorang nelayan yang tidak dapat melaut karena mahalnya bahan bakar, dan seorang anak yang tidak memperoleh pendidikan berkualitas adalah persoalan politik yang sesungguhnya. Politik tidak boleh berhenti pada pertanyaan siapa yang berkuasa. Politik harus menjawab untuk siapa kekuasaan itu digunakan.

Saya teringat pengalaman mengikuti dinamika gerakan buruh di Amerika Serikat pada 2008. Gerakan buruh bukan hanya berbicara tentang upah dan hubungan industrial. Mereka juga memperjuangkan akses terhadap kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pekerjaan yang layak, serta kesempatan yang setara dalam kehidupan politik.

Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi membutuhkan masyarakat yang terorganisasi dan berani menyampaikan kepentingannya. Rakyat tidak boleh hanya hadir ketika pemilu berlangsung, kemudian menghilang dari proses pengawasan setelah para pemimpin terpilih. Demokrasi harus hidup setiap hari melalui partisipasi, dialog, kritik, dan keberanian memperjuangkan kepentingan publik. Karena itu, nilai universal politik yang perlu terus dipertahankan adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Tidak boleh ada kebijakan yang menganggap penderitaan rakyat sebagai angka statistik semata. Tidak boleh pula ada kekuasaan yang merasa dirinya lebih besar daripada kepentingan masyarakat.

Demokrasi Harus Membuat Manusia Lebih Merdeka

Pemilu Sela Amerika Serikat memberikan satu pelajaran bahwa demokrasi menyediakan ruang bagi rakyat untuk melakukan koreksi terhadap kekuasaan. Tetapi pelajaran yang lebih besar adalah bahwa demokrasi harus selalu diuji melalui dampaknya terhadap kehidupan manusia. Demokrasi yang hanya menghasilkan pergantian kekuasaan, tanpa memperbaiki kehidupan rakyat, akan kehilangan kepercayaan publik. Sebaliknya, demokrasi yang menjamin kebebasan, memperluas kesempatan, menghadirkan keadilan, dan melindungi kelompok rentan akan menjadi kekuatan bagi kemajuan peradaban. Demokrasi bukan sekadar mekanisme untuk memilih siapa yang memimpin.

Ia adalah kesepakatan moral dan politik bahwa setiap manusia memiliki martabat, hak, dan kesempatan yang harus dihormati. Pada akhirnya, baik di Amerika Serikat maupun di berbagai belahan dunia lainnya, ukuran keberhasilan politik tidak semestinya hanya dilihat dari kemenangan elektoral, pertumbuhan ekonomi, atau besarnya kekuasaan yang dimiliki seseorang.

Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah kehidupan manusia menjadi lebih baik, apakah rakyat memperoleh kesempatan yang lebih adil, apakah pekerjaan memberikan penghidupan yang layak, apakah anak-anak memiliki masa depan, dan apakah setiap orang dapat hidup dengan martabatnya. Sebab, demokrasi bukan tujuan yang selesai ketika surat suara dihitung.

Demokrasi adalah jalan panjang untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap menjadi milik rakyat dan pembangunan tetap berpihak kepada manusia. Pada akhirnya, politik seharusnya menjadi jalan untuk memanusiakan manusia. Itulah nilai universal yang melampaui batas negara, ideologi, agama, dan partai politik. (*)

Penulis adalah
Politisi Partai NasDem

Perubahan Perda Disetujui Bersama

TILONGKABILA-GP – Usulan perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bone Bolango akhirnya mendapat persetujuan bersama DPRD dan pemerintah daerah.

Usulan yang secara resmi diajukan sejak April lalu itu disetujui dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat II terhadap satu Ranperda usul inisiatif eksekutif, Kamis (5/11) kemarin.

Persetujuan tersebut diberikan oleh seluruh anggota dan pimpinan DPRD yang hadir dalam rapat paripurna. Selanjutnya, Ranperda tersebut akan diproses untuk ditetapkan menjadi Perda. Meski tidak merinci substansi perubahan yang diusulkan, persetujuan bersama ini menjadi tahapan penting dalam upaya mengubah ketentuan mengenai penetapan hari ulang tahun Kabupaten Bone Bolango.

Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengaku memahami betul sejarah proses pemekaran daerah tersebut. Bahkan, dirinya merupakan bagian dari perjalanan pembentukan Kabupaten Bone Bolango saat jadi ketua Tim yang berhadapan dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Karena itu, ia ingin mengembalikan peringatan HUT Bonbol pada hari dan waktu yang dianggap tepat berdasarkan sejarah kelahirannya sebagai daerah otonom. "Saya akan kembalikan kepada hari dan waktu yang tepat lahirnya Kabupaten Bonbol yang ditandai dilantiknya saya di DPR RI di Jakarta," ujarnya.

Diketahui, sejak 2018, HUT Kabupaten Bone Bolango ditetapkan untuk diperingati setiap 27 Januari. Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan yang sebelumnya mempertimbangkan empat opsi tanggal.

Masing-masing 23 Januari 2002, bertepatan dengan deklarasi pembentukan Kabupaten Bone Bolango; 27 Januari 2003, saat berlangsungnya rapat paripurna di DPR RI; 22 Februari, tanggal ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango; serta 6 Mei, bertepatan dengan peresmian penyelenggaraan pemerintahan oleh Menteri Dalam Negeri melalui pelantikan penjabat bupati. Dengan adanya usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2018 ini, penetapan tanggal peringatan HUT Bone Bolango kembali menjadi perhatian untuk disesuaikan dengan sejarah pembentukan daerah tersebut. **(csr)**



(FOTO YAMIN/HUMAS)

PARIPURNA yang dilaksanakan DPRD Bonbol kemarin.

KUA-PPAS 2027 Disepakati

DPRD Segera Serahkan Dokumen ke Bupati untuk Diteruskan ke Provinsi

TILONGKABILA-GP – Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2027 akhirnya disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Bonbol. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna tingkat II yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bonbol Faisal Yunus, didampingi Wakil Ketua Azan Piola dan Zainudin Pedro Bau.

Aleg Amin Nusi, selaku perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bonbol, menjelaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS tersebut telah mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan mengenai pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2027.

Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS bertujuan memastikan alokasi anggaran daerah selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang disusun diharapkan tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan fiskal daerah.

Adapun postur anggaran daerah yang diproyeksikan dalam KUA-PPAS 2027 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp862 miliar lebih, belanja daerah Rp831 miliar lebih, serta pembiayaan daerah sebesar Rp31 miliar. Proyeksi tersebut selanjutnya menjadi salah satu landasan dalam tahapan penyusunan APBD tahun anggaran 2027.

Sementara itu, Ketua DPRD Bonbol Faisal Yunus menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi selama proses pembahasan hingga dokumen KUA-PPAS dapat disepakati dan diparipurnakan. "Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi bersama sehingga KUA-PPAS 2027 ini telah selesai. Selanjutnya, kami akan menyerahkannya kepada Bupati untuk diteruskan ke provinsi guna mendapatkan nomor registrasi," ujarnya. **(csr)**

Enam Ranperda Lewati Kajian dan Harmonisasi Mendalam

TILONGKABILA-GP – Enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) di Kabupaten Bone Bolango telah melalui tahapan pembahasan, pengkajian, harmonisasi, dan penyempurnaan secara mendalam. Proses tersebut dilaksanakan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bonbol bersama tim asisten daerah sebagai bagian dari upaya memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki landasan dan kualitas regulasi yang kuat.

Ketua Bapemperda DPRD Bonbol Romi Mohamad menjelaskan, pembahasan tersebut dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi Bapemperda berdasarkan penugasan pimpinan DPRD. Dalam prosesnya, Bapemperda melibatkan tim penyusun dari pihak eksekutif, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta komisi-komisi di DPRD. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Menurut Romi, seluruh tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap Ranperda memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. " Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan diharapkan memenuhi seluruh aspek pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis," ujarnya.

Ia menegaskan, kajian dan harmonisasi menjadi bagian penting dalam proses pembentukan Perda. Sebab, setiap regulasi yang disusun tidak hanya harus memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah**. (csr)**

Sekjen Gerindra Pertanyakan Motif Listyo Menyadap Prabowo

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO
JLN. PROF. DR/ ING. B. J HABIBIE DESA MOUTONG KEC. TILONGKABILA, BONE BOLANGO - Telp. (0435)824582

PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG
Nomor : 20/DI304-30.05/XI/2026

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No.	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	Keterangan
1.	30.05.01.05.1.00173	BUCHARI ANTULI	DESA TALULOBUTU	04/07/2025	

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas : 7002/2026
Nama Pemohon : NURDIN HAMMA
DI 301 : 1660/2026

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mempertanyakan motif Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi menyadap Presiden Prabowo Subianto.

Padahal, ketiganya yang merupakan anggota Polri adalah institusi yang berada langsung di bawah Prabowo. "Sesuatu yang luar biasa ya sangat disayangkan kemudian juga, kami di Gerindra berpandangan apasih motifnya apasih dasarnya," ucap Sugianto di Istana Negara, pada Rabu (4/11).

"Penyadapan dilakukan kepada kepala pemerintahan kepada presiden dalam hal ini oleh institusi yang berada di bawah beliau," kata dia. Menteri Politik dan Keamanan itu menilai bahwa penyadapan tersebut sebagai bentuk insubordinasi hingga makar. "Merupakan suatu bentuk insubordinasi, kemudian bisa jadi kemudian ditemukan motif-motif yang mengarah makar kepada presiden," tuturnya.

Partai Gerindra pun menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Suyudi Ario Seto dan jajarannya yang telah melakukan proses pengungkapan kasus penyadapan. "Tentu saja kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan untuk bisa mengetahui lebih lanjut, tapi sekali lagi ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat disayangkan," jelas Sugiono.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang tersangka kasus penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

Ketiga orang itu merupakan polisi aktif yang juga merupakan perwira tinggi Polri.

"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11). **(jpnn)**

DISERAHKAN SECARA SIMBOLIS OLEH PJ SEKDA

Korban Kebakaran di Limba B Terima Bantuan Pemkot



(FOTO: PROKOPIM)

Pj Sekda Kota Gorontalo, Nuryanto menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban kebakaran di Limba B, Rabu (4/11/2026).

GORONTALO – GP – Pemerintah Kota Gorontalo bergerak membantu warga yang terdampak kebakaran di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan. Sebanyak 21 jiwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut menerima santunan untuk membantu memenuhi kebutuhan selama masa pemulihan.

Bantuan diserahkan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kota Gorontalo, Nuryanto, Rabu (4/11/2026). Ia hadir mewakili Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, sekaligus menyambangi para korban yang kini masih menempati tenda darurat tidak jauh dari lokasi kebakaran.

Dalam penyerahan bantuan itu, Nuryanto didampingi Kepala BAZNAS Kota Gorontalo Mohamad Husain Rauf, Kepala BPBD Hendry Ticoalu, serta Lurah Limba B Mohamad Rizki.

Kebakaran tersebut mengakibatkan dua rumah mengalami kerusakan berat hingga sebagian besar bangunannya hangus. Sementara dua rumah lainnya turut terdampak, tetapi hanya mengalami kerusakan ringan.

Dua rumah yang mengalami kerusakan parah masing-masing dihuni satu keluarga. Rumah pertama ditempati Budi Runu Dalie bersama empat anggota keluarganya. Sedangkan rumah kedua dihuni Ramna Uge bersama seorang anaknya.

Lurah Limba B, Mohamad Rizki, menjelaskan, dua rumah lainnya mengalami kerusakan akibat dampak proses pemadaman api.

Salah satu rumah, kata dia, bahkan harus membongkar bagian dapur dan kamar untuk membuka akses bagi petugas pemadam kebakaran.

Langkah tersebut dilakukan karena kobaran api sudah mendekati bangunan.

"Syukur dua rumah lainnya yang ikut terdampak tidak mengalami kerusakan parah," ungkap Rizki saat mendampingi kunjungan Pj. Sekda.

Adapun rumah lainnya mengalami kerusakan pada bagian dinding belakang akibat terkena api dan genangan air saat proses pemadaman berlangsung.

Penyaluran santunan ini menjadi bentuk kepedulian Pemkot Gorontalo terhadap warga yang tengah menghadapi masa sulit setelah kehilangan tempat tinggal. Apalagi, para korban untuk sementara masih harus bertahan di tenda pengungsian dengan segala keterbatasan.

Nuryanto berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan para korban sekaligus meringankan beban mereka dalam menjalani masa pemulihan pascakebakaran.**(adv)**

Pengusaha Hiburan dan Hotel

Diminta Ikut Jaga Kondusivitas Daerah

GORONTALO – GP – Pemerintah Kota Gorontalo mengingatkan para pelaku usaha hiburan malam dan perhotelan agar tidak hanya berorientasi pada aktivitas bisnis, tetapi juga turut bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Gorontalo, Dandy Datau, saat menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha hiburan malam dan perhotelan.

Dalam pertemuan tersebut, Dandy menekankan pentingnya kepatuhan pengelola usaha terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perizinan, standar operasional, serta ketentuan mengenai ketertiban umum.

Ia mengingatkan agar tempat hiburan maupun hotel tidak dimanfaatkan untuk memfasilitasi aktivitas yang bertentangan dengan hukum atau berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Dandy juga meminta pengusaha lebih cermat dalam menerima berbagai kegiatan yang diselenggarakan di tempat usaha masing-masing, termasuk kegiatan yang melibatkan komunitas LGBT. Menurutnya, setiap aktivitas tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

"Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tempat usaha yang dikelola tidak menjadi ruang bagi kegiatan yang melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, ataupun menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," tegasnya.Meski demikian, Dandy memastikan pemerintah tidak bermaksud membatasi perkembangan dunia usaha maupun menghambat investasi di Kota Gorontalo.

Menurutnya, kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan dan berkembang selama pelaksanaannya memperhatikan aturan hukum, norma sosial, serta kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Ia turut mengingatkan bahwa menjaga stabilitas daerah bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan aparat keamanan. Para pengusaha juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang aman dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

Melalui pertemuan tersebut, Pemkot Gorontalo berharap para pengelola hiburan malam dan perhotelan memiliki pemahaman serta komitmen yang sama dalam menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab.

"Usaha silakan berkembang, investasi silakan berjalan, tetapi tanggung jawab terhadap ketertiban dan kondusivitas daerah tidak boleh diabaikan," tandas Dandy.**(adv)**

Indra Gobel Tekankan Empat Prioritas FKUB

GORONTALO – GP – Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Gorontalo periode 2026–2031 mendapat empat amanah penting dari Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel. Keempatnya berkaitan dengan penguatan kerukunan, penyelesaian potensi konflik sosial, edukasi moderasi beragama, hingga peningkatan sinergi lintas lembaga.

Pesan tersebut disampaikan Indra saat menghadiri pengukuhan pengurus FKUB Kota Gorontalo di Bandhayo Lo Yiladia, Rabu (4/11/2026).

Menurut Indra, FKUB memiliki posisi strategis dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Organisasi ini tidak sekadar menjadi ruang komunikasi antarumat beragama, tetapi juga berperan sebagai penghubung persaudaraan sekaligus mitra pemerintah.

"FKUB bukan hanya menjadi wadah komunikasi antarumat beragama, tetapi juga sebagai jembatan persaudaraan dan mitra pemerintah," kata Indra.

Ia meminta pengurus yang baru dikukuhkan menjadikan kerukunan sebagai pijakan utama dalam menjalankan organisasi.

Komunikasi yang terbuka dengan seluruh elemen masyarakat juga perlu terus dibangun agar perbedaan tidak berkembang menjadi persoalan sosial.

Selain itu, FKUB diharapkan tampil sebagai mediator dan fasilitator ketika muncul persoalan yang berpotensi mengganggu keharmonisan antarumat beragama.

Indra juga menekankan pentingnya memperluas edukasi dan sosialisasi moderasi beragama, terutama di kalangan generasi muda. Upaya tersebut dinilai penting untuk menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan sejak dini.

Pesan berikutnya adalah memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Gorontalo, Kementerian Agama, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Indra berharap empat hal tersebut tidak berhenti sebatas arahan, tetapi diwujudkan dalam program dan kerja nyata kepengurusan FKUB selama lima tahun ke depan.

Ia pun mengajak seluruh pengurus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi mempertahankan Kota Gorontalo sebagai daerah yang aman, damai, dan harmonis di tengah keberagaman masyarakatnya.**(adv)**

Posisi Kas Daerah Per 04 November 2026

I	Posisi Saldo Kas BUD per 03 November 2026		94.558.145.441,64
	Penerimaan Kas Daerah per 04 November 2026	6.174.525.842,59	
	Pengeluaran Kas Daerah per 04 November 2026	6.542.394.161,00	
II	Saldo Akhir per 04 November 2026		94.190.277.123,23

Gorontalo, 05 November 2026

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA GORONTALO

Ttd

MARWAN MURSIDI, S.Sos, MH

HUT ke-55 Korpri Diisi Aksi Peduli Warga

5.000 Liter Air Disalurkan ke Wilayah Terdampak

GORONTALO – GP – Peringatan HUT ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Gorontalo tidak sekadar diisi dengan kegiatan seremonial. Para aparatur sipil negara (ASN) justru memilih merayakannya melalui aksi kemanusiaan dengan membantu warga yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang.

Melalui inisiatif pengurus dan anggota Korpri, bantuan sekitar 5.000 liter air bersih disalurkan kepada masyarakat di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, dan Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat.

Air bersih tersebut didistribusikan menggunakan satu unit mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.

Asisten II Setda Kota Gorontalo, Abdulhafidz Daud, mengatakan aksi sosial ini lahir dari kepedulian anggota Korpri terhadap kondisi masyarakat yang hingga kini masih menghadapi krisis air bersih.

Menurutnya, kemarau panjang yang diperparah fenomena El Niño menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Gorontalo mengalami keterbatasan pasokan air.

"Kami berinisiatif menyalurkan air bersih mengingat sampai dengan hari ini beberapa wilayah yang ada di Kota Gorontalo masih mengalami kekeringan dan minim air bersih akibat dampak kemarau panjang," jelas Abdulhafidz.

Ia menambahkan, kepedulian tersebut mendorong anggota Korpri untuk turun langsung membantu masyarakat, terutama warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

"Hari ini kami turun di Leato Selatan, selanjutnya kita akan bergeser ke Dembe I untuk menyuplai air bersih ke rumah-rumah warga yang kesulitan memperoleh air bersih," ujarnya.



(FOTO: KOMINFO)

Penyaluran air bersih yang diselenggarakan KORPRI Kota Gorontalo, Kamis (5/11/2026).

Aksi tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Aziz Husain, salah seorang warga Leato Selatan, mengaku lega karena bantuan air bersih akhirnya tiba setelah warga setempat mengalami kesulitan selama beberapa pekan.

"Alhamdulillah akhirnya dapat air karena sudah beberapa pekan terakhir kami kesulitan memperoleh air bersih," ungkapnya.**(adv)**

https://digital.gorontalopost.id

https://gorontalopost.id